

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024**



**BPKAD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ini, menjadi dokumen yang dapat membantu pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan evaluasi kinerja personal serta dapat memberikan manfaat yang optimal pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Pemalang, 10 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, M.E
Pembina Utama Muda
NIP.19720129 199803 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah. Tujuan ini diukur dengan 2 Indikator yaitu :

1.1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- Pengukuran IPKD berdasarkan pada ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, IPKD diukur melalui 6 (enam) Dimensi yang meliputi :
 - a. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran)
 - b. Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD)
 - c. Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
 - d. Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran)
 - e. Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah)
 - f. Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD)
- Terdapat 1 program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sangat menunjang indikator hasil pengukuran IPKD tersebut yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pada Tahun 2024, persentase capaian Indikator Hasil Pengukuran IPKD adalah 87,66% yaitu dari target hasil pengukuran IPKD sebesar 80 realisasinya 70,1277 atau masuk kategori capaian tinggi.
- Pada Tahun 2023, capaian indikator ini adalah 65,7108 dari target 80 atau persentase capaian sebesar 82,14%.
- Sehingga apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 tersebut maka pada tahun 2024 telah terjadi peningkatan sebesar 5,52%.

- Terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun-tahun berikutnya yaitu :
 1. Peningkatan keselarasan nominal program yang tercantum pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA PPAS dan APBD);
 2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mematuhi mandatory spending dan amanat pengalokasian anggaran untuk standar pelayanan minimal;
 3. Peningkatan konsistensi pengalokasian belanja tidak terduga agar bisa dibelanjakan dengan optimal;
 4. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan yang didukung dengan publikasi data keuangan ke website penda tepat waktu dan kemudahan akses oleh Masyarakat;
 5. Peningkatan akuntabilitas data keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan Masyarakat;
 6. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

1.2. Persentase pemanfaatan barang milik daerah (BMD)

- Indikator persentase pemanfaatan barang milik daerah dihitung dengan membandingkan jumlah asset daerah yang telah dimanfaatkan dengan sistim sewa dibandingkan dengan jumlah semua asset daerah yang dapat dimanfaatkan.
- Capaian indikator ini sangat ditunjang oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Pada Tahun 2024, target persentase pemanfaatan BMD sebesar 99,15% sedangkan realisasinya 99,13% atau tercapai dengan capaian kinerja sebesar 99,98%.
- Pada Tahun 2023, dari target sebesar 93% realisasinya sebesar 99,13% atau tercapai sebesar 106,59%.
- Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 maka capaian kerjanya menurun, tetapi hal ini disebabkan

karena target pada tahun 2024 dinaikkan, lebih besar dari realisasi 2023.

- Terhadap capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah yaitu :
 1. Peningkatan akuntabilitas data potensi barang milik daerah yang dapat disewakan dan barang milik daerah yang telah disewakan;
 2. Peningkatan kualitas dokumen sewa barang milik daerah;
 3. Penyederhanaan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah;
 4. Peningkatan kualitas pemanfaatan barang milik daerah berbasis sistem informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.
- 2. Sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur dengan Indikator sebagai berikut :
 - 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang setiap akhir semester. SKM ditujukan kepada pengguna layanan BPKAD Kabupaten Pemalang baik perangkat daerah, Masyarakat ataupun stakeholder lainnya.
 - Indeks kepuasan Masyarakat didukung oleh kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - Target capaian indikator kinerja IKM tahun 2024 sebesar 84,09 dengan realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar 86,63 sehingga capaian IKM Tahun 2024 tercapai sebesar 103,02%.
 - Pada Tahun 2023, target IKM sebesar 84,08 dengan realisasi 82,67 atau capaiannya sebesar 98,32.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan 4,7%.
 - Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan BPKAD Kabupaten Pemalang;
2. Peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan pelayanan pada BPKAD Kabupaten Pemalang;
3. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan;

2.2. Nilai SAKIP BPKAD

- Capaian indikator Nilai SAKIP BPKAD diperoleh dari hasil reviu SAKIP BPKAD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang.
- Capaian indikator Nilai SAKIP BPKAD didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator nilai SAKIP BPKAD Tahun 2024 sebesar 64,00, sampai dengan bulan Desember 2024 realisasinya 64,15 atau capaian sebesar 100,23%.
- Pada Tahun 2023, target nilai SAKIP BPKAD sebesar 60,50 dengan realisasi 63,25 atau capaian sebesar 104,55%.
- Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, maka capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,32%.
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselarasan indikator kinerja antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
2. Peningkatan keselarasan kinerja antara pohon kinerja dan cascading kinerja;
3. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan capaian kinerja;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja.

3. Sasaran kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diukur dengan Indikator sebagai berikut :

3.1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran

- Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran diukur dengan membandingkan kesesuaian nomenklatur program dan nominal program antara dokumen KUA PPAS dan APBD.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah. ;
- Target capaian indikator kinerja hasil pengukuran indeks kesesuaian dokumen penganggaran tahun 2024 sebesar 15, sedangkan realisasinya sebesar 6,5277 atau dengan capaian sebesar 43,52%.
- Pada Tahun 2023, target indikator sasaran tersebut sebesar 15 dengan realisasi 12,6237 atau dengan capaian sebesar 84,16%
- Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,93%..
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPKAD Kabupaten Pemalang ke depan yaitu :
 1. Peningkatan kesesuaian nomenklatur program dan nominal program yang tercantum pada dokumen KUA PPAS dan APBD;
 2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pihak legislative terkait pentingnya keselarasan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

3.2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

- Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran diukur dengan realisasi anggaran yang tercapai pada akhir tahun anggaran per jenis belanja, minimal 80%. Terdapat 4 Jenis belanja pada APBD yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.
- Capaian indikator ini didukung oleh kinerja program pengelolaan keuangan daerah.
- Target indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 20 dengan realisasi 15 atau capaiannya 75%.

- Capaian indikator ini sama dengan capaian pada tahun 2023, yaitu 75% .
 - Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPKAD Kabupaten Pematang Jaya ke depan sebagai berikut :
 1. Peningkatan konsistensi pengalokasian anggaran belanja tidak terduga pada APBD;
 2. Peningkatan kualitas dokumen regulasi yang mengatur tentang pengelolaan belanja tidak terduga.
- 3.3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah
- Indikator sasaran ini diukur berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Komponen yang menentukan hasil pengukuran indeks kondisi keuangan daerah adalah kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka Panjang dan solvabilitas layanan. Masing-masing komponen tersebut memiliki rumus perhitungan tersendiri yang mendasarkan data yang tercantum pada Neraca, LRA, LO dan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pematang Jaya.
 - Capaian indikator ini sangat ditunjang oleh kinerja program pengelolaan keuangan daerah.
 - Target indikator sasaran ini pada tahun 2024 sebesar 15 dengan realisasi 4,0260 atau capainnya sebesar 26,84%.
 - Sedangkan pada tahun 2023, targetnya masih sama yaitu 15 tetapi realisasinya sebesar 2,2200 atau capainnya sebesar 14,80%.
 - Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 maka capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,04%.
 - Terhadap capaian kinerja tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPKAD Kabupaten Pematang Jaya ke depan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Peningkatan akuntabilitas data yang tercantum pada laporan keuangan daerah dan memenuhi ketentuan pada standar akuntansi pemerintah.

3.4. Persentase barang milik daerah yang dimiliki.

- Indikator sasaran ini diukur dengan membandingkan antara barang milik daerah berupa tanah pemda yang telah bersertifikat dengan tanah yang dikuasai oleh Pemda.
- Capaian kinerja indikator ini sangat didukung oleh kinerja program pengelolaan barang milik daerah.
- Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 65% realisasinya sebesar 45,53% sehingga capaiannya sebesar 70,05%.
- Sedangkan pada tahun 2023, target indikator ini sebesar 60% dengan realisasi sebesar 36,96% atau capaiannya sebesar 61,60%.
- Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 maka pada tahun 2024 telah terjadi kenaikan capaian sebesar 8,45%.
- Terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian BPKAD Kabupaten Pemalang ke depan sebagai berikut :
 1. Peningkatan kompetensi SDM pelaksana pengelolaan barang milik daerah;
 2. Peningkatan akuntabilitas data potensi BMD berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 3. Peningkatan upaya penyelesaian proses sertifikasi tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 4. Peningkatan kualitas inventarisasi tanah yang dikuasai oleh Pemda termasuk inventarisasi permasalahannya.

Ikhtisar Eksekutif dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sangat penting untuk dipergunakan sebagai pedoman dan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	4
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.2.2. Anggaran	9
1.3. Dasar Hukum	9
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	11
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang	31
3.1.1. Skala Capaian Kinerja	32
3.1.2. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2024	32
3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya	82
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD Kabupaten Pemalang.....	87

3.1.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi	92
3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	98
3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya	102
3.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	115
3.2. Realisasi Anggaran	118
BAB IV PENUTUP.....	122
LAMPIRAN	125
1. Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	.
2. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	.
3. Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	.
4. Hasil Reviu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang	.
5. Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang	.
6. Pohon Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang	.
7. Cascading Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang	.
8. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Tahun 2023	.
9. Tindak lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang	.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan Tingkat Golongan per 31-12-2024.....	5
Tabel 1.2 : Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31-12-2024.....	5
Tabel 1.3 : Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan Jenis Kelamin per 31-12-2024.....	6
Tabel 1.4 : Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jabatan dan kelas jabatan Per 31 Desember 2024.....	6
Tabel 1.5 : Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	9
Tabel 2.1 : Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta target kinerja BPKAD Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	12
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab Pemalang Tahun 2024	14
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Pemalang	17
Tabel 2.4 : Strategi dan Program BPKAD Kabupaten Pemalang ...	18
Tabel 2.5 : Program dan Indikator Program BPKAD Kabupaten Pemalang	18
Tabel 2.6 : Strategi dan Kebijakan BPKAD Kab Pemalang Tahun 2024	19
Tabel 2.7 : Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	21
Tabel 2.8 : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024	26
Tabel 2.9 : Alokasi Anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang pada penetapan dan perubahan APBD Tahun 2024	27
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.3 : Hasil Pengukuran IKFD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024	35
Tabel 3.4 : Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023	35
Tabel 3.5 : Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024	41

Tabel 3.6	: Daftar Potensi Barang Milik Daerah yang dapat disewakan pada Tahun 2024	42
Tabel 3.7	: Target dan Realisasi Nilai SAKIP BPKAD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024	72
Tabel 3.8	: Rincian Anggaran dan Realisasi per jenis belanja berdasarkan LRA Pemkab Pemalang Tahun 2023.....	75
Tabel 3.9	: Perbandingan Capaian Kinerja	83
Tabel 3.10	: Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	87
Tabel 3.11	: Perbandingan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang dengan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah dalam kelompok klaster kapasitas fiskal rendah/sangat rendah yang dilaksanakan pada Tahun 2024	92
Tabel 3.12	: Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024	94
Tabel 3.13	: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024	95
Tabel 3.14	: Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi	99
Tabel 3.15	: Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran serta efisiensi BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024.....	103
Tabel 3.16	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	107
Tabel 3.17	: Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	116
Tabel 3.18	: Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	119

i
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Mekanisme Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Pemalang	3
Gambar 2 : Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang	8
Gambar 3 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2024.....	67
Gambar 4 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2024	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BPKAD Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan Gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dasar regulasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Pemalang adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

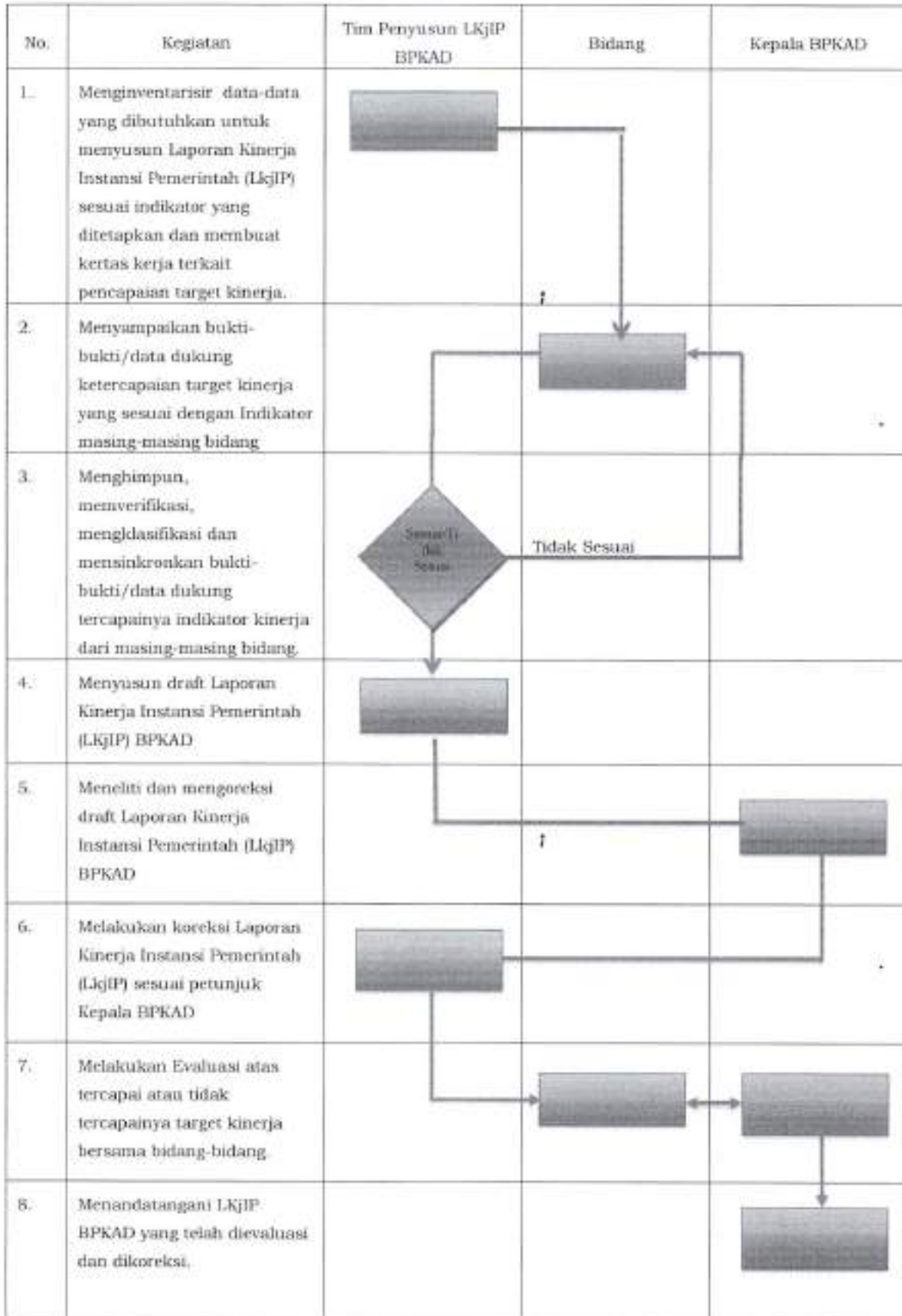
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan bermuara pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menggunakan mekanisme sebagai berikut :

:

Gambar 1
Mekanisme Penyusunan LKjIP BPKAD Kabupaten Pemalang



LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja BPKAD selama Tahun 2024, yang diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang :

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan pelaksanaan tugas tersebut, maka BPKAD melaksanakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Anggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tertanggal 9 Nopember 2023. Pada Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 ditetapkan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Pencairan Dana;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Bendahara Umum.
5. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Aset Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang :

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATENPEMALANG
 (Dasar : Perbup No.42 Tahun 2023)



Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tingkat pendidikan cukup, kecakapan kerja sesuai dengan jabatan dan fungsinya serta latar belakang Pendidikan yang selaras dengan tugas dan jabatannya. Pada akhir tahun 2024, jumlah ASN pada BPKAD sebanyak 35 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 22 orang Perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Sebagian besar telah melibatkan Perempuan, sebagaimana amanat pengarusutamaan gender (PUG) dimana Perangkat Daerah harus melibatkan Perempuan dalam kegiatan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). Adapun data sumberdaya manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel ; 1.1
Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	1	7	1	9
3.	Bidang Anggaran	-	-	4	2	6
4.	Bidang Perbendaharaan	-	1	8	1	10
5.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	-	7	2	9
	Jumlah	-	2	26	6	35

Sumber : DUK BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Tabel : 1.2
Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	1	1	-	6	1	-	9
3.	Bidang Anggaran	-	1	1	2	2	-	6
4.	Bidang Perbendaharaan	-	2	1	5	2	-	10
5.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	-	-	5	4	-	9
	Jumlah	1	4	2	18	10	-	35

Sumber : DUK BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Tabel : 1.3
Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretariat	4	5	9
3.	Bidang Anggaran	3	3	6
4.	Bidang Perbendaharaan	3	7	10
5.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	4	5	9
	Jumlah	15	20	35

Sumber : DUK BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Tabel : 1.4
Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Jabatan dan kelas jabatan
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	SEKRETARIAT	BID ANGGARAN	BID PERBENDAHARAAN	BID AKUNTANSI & ASET DAERAH	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	4	3	3	3	13
2.	Pejabat Fungsional	-	-	-	1	1
3.	Pelaksana kelas jabatan 7	3	1	1	5	10
4.	Pelaksana kelas Jabatan 6	2	2	6	-	10
5.	Pelaksana kelas Jabatan 5	-	-	-	-	-
6.	Pelaksana kelas Jabatan 3	1	-	-	-	1
	Jumlah	10	6	10	9	35

Sumber : DUK BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

1.2.2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Pemalang. Berikut adalah anggaran yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Pemalang :

Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah Anggaran
1	2	3
APBD	2023	Rp.445.201.501.950,00
APBD	2024	Rp.454.344.118.887,00

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan 2024

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan rancangan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

1. Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
2. Renja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024
3. Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024
4. Hasil Reviu LKjIP oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang
5. Hasil Reviu LKjIP oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang
6. Pohon Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang
7. Cascading Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang
8. LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2023
9. Tindak Lanjut LHE Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke 2 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka mencapai visi dan misi, ditetapkan tujuan dan sasaran daerah. Sasaran Daerah membutuhkan dukungan perangkat daerah dalam pencapaian indikator sasaran daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan Tujuan, Sasaran beserta Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2. Persentase Pemanfaatan BMD	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Bobot Nilai	15	15	15	15	15	15
			2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Bobot Nilai	20	20	20	20	20	
			3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Bobot Nilai	15	15	15	15	15	
			4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	50	55	60	65	70	70
	--	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,08	84,08	84,09	84,09	84,10	84,10
			2. Nilai SAKIP (Nilai)	Nilai	60,30	60,40	60,50	64,00	60,30	60,40

Sumber : Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung salah satu tujuan daerah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dan Efisien dengan indikator tujuan daerah Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang. Sasaran Daerah yang didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, dengan Indikator Sasaran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD).

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

;

;

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80	IPKD terdiri dari 6 Dimensi yaitu Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan), Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran), Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah) dan Dimensi 6 (Opini BPK). Hasil Pengukuran IPKD merupakan jumlah dari hasil pengukuran masing-masing Dimensi IPKD pada tahun berkenaan.	IPKD = Hasil Pengukuran (Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6)	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	93	Perbandingan Barang Milik Daerah yang telah dimanfaatkan dengan Potensi Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan.	$\frac{\text{Jumlah BMD yang sudah dimanfaatkan}}{\text{Jumlah BMD yang dapat dimanfaatkan}} \times 100\%$	Database BMD dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09	Merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BPKAD setiap semester, atas layanan yang diberikan.	$\frac{\text{Hasil SKM smtr 1} + \text{Hasil SKM smtr 2}}{2}$	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di BPKAD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15	Mengukur kesesuaian Nomenklatur program dan nominal program pada Dokumen KUA PPAS dan APBD.	Nomenklatur program dan nominal program pada KUA PPAS yang sesuai dengan APBD diberi nilai 1, yang tidak sesuai diberi nilai 0. Selanjutnya dibagi dengan jumlah program. Hasil Pengukuran Kesesuaian Nomenklatur Program pada KUA PPAS dan APBD + Hasil Kesesuaian Nominal Program pada KUA PPAS dan APBD X 15 2	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20	Merupakan Dimensi ke 4 IPKD. Mengukur penyerapan anggaran per jenis belanja pada APBD. Jenis Belanja pada APBD yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.	Realisasi Belanja minimal 80% diberi nilai 1, yang kurang dari 80% diberi nilai 0. Hasil Pengukuran Penyerapan Anggaran (Belanja Operasional + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga + Belanja Transfer) X 20 4	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15	Mengukur Kondisi Keuangan Daerah yang terdiri dari Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Layanan, berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tercantum pada	Kemandirian Keuangan = Total PAD/ Total Pendapatan Fleksibilitas Keuangan = (Total Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai) Solvabilitas Operasional = (Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO) / Total Beban LO Solvabilitas Jangka Pendek = (Kas dan setara kas - Investasi jangka pendek)/kewajiban lancar Solvabilitas jangka Panjang = Total asset tetap/kewajiban jangka Panjang Solvabilitas Layanan = Total asset tetap/jumlah	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					LKPD, LRA, LO dan Neraca.	penduduk (Hasil Pengukuran Kemandirian Keuangan + Hasil Pengukuran Fleksibilitas Keuangan + Hasil Pengukuran Solvabilitas Operasional + Hasil Pengukuran Solvabilitas Jangka Pendek + Hasil Pengukuran Solvabilitas Jangka Panjang + Hasil Pengukuran Solvabilitas Layanan) X 15 6	
		Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	%	65	Membandingkan jumlah barang milik daerah (dalam hal ini aset daerah berupa tanah) yang telah memiliki bukti kepemilikan dibandingkan dengan bidang tanah milik pemerintah kabupaten pemalang yang dicatat pada Kartu Inventaris Barang.	$\frac{\text{Jumlah Tanah yang telah bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah milik yang tercatat pada KIB}} \times 100\%$	Data sertifikat tanah dan tanah milik Pemda dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

Sumber : Keputusan Kepala BPKAD Nomor : 954/505/TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan IKU BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun 2024 termuat di dalam dokumen renja perangkat daerah tahun 2024. Berikut rencana kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah		Hasil Pengukuran IPKD	Indeks	80
			Persentase Pemanfaatan BMD	%	93
1.1		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09
1.2		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15
			Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20
			Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15
			Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	%	65

Sumber : Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada Tahun 2024 terdapat 3 Program yang dirumuskan untuk mendukung sasaran pada BPKAD sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sasaran dan Program BPKAD Kabupaten Pemalang

Sasaran	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sumber : Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Ketercapaian program tergantung pada tercapai tidaknya indikator program yang ditetapkan. Ada pun indikator program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Program dan Indikator Program BPKAD Kabupaten Pemalang

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP BPKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan 2. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum 3. Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan 4. Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan 5. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan
Program Pengelolaan BMD	Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan BMD

Sumber : Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi dijabarkan pelaksanaannya menggunakan kebijakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Strategi yang sederhana tetapi mudah untuk dijabarkan dalam kebijakan dan mudah untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, merupakan alat bagi perangkat daerah

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan Kebijakan BPKAD tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Strategi dan Kebijakan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap mandatory spending dan mengoptimalkan keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pengelolaan barang milik berbasis aplikasi/teknologi informasi. 3. Penatausahaan Keuangan Daerah berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas, percepatan pelayanan dan transparansi penatausahaan keuangan daerah. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyampaian laporan SKPD untuk menjamin kualitas pelaporan dan akuntabilitas data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Meningkatkan kompetensi, integritas dan kapabilitas ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kebutuhan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia khususnya untuk jabatan fungsional pengelola

Strategi	Kebijakan
	barang milik daerah dan jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah. 2. Memberikan kesempatan (Bimtek/Diklat/Sosialisasi/Uji kompetensi) kepada semua ASN untuk mengembangkan kariernya.
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui media elektronik serta memprioritaskan kemudahan akses bagi masyarakat dan stakeholder.	Mengoptimalkan transparansi data keuangan dan aset daerah melalui Website Pemda, Website BPKAD dan media publikasi lainnya, agar mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi mempermudah Masyarakat dan pihak lainnya dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sumber : Renja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran IPKD	Indeks	80
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	93
1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09
		Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	64,00
1.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15
		Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	%	65

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Anggaran

- Rp. 10.896.047.650,00
- Rp. 440.828.026.000,00
- Rp. 947.000.000,00

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan perubahannya. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024 :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.2.250.000,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp.500.000,00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp.2.250.000,00
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp.2.250.000,00
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp.7.750.000,00
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Rp.2.250.000,00

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.6.250.396.000,00
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.41.500.000,00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.750.000,00

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang hanya didukung 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.110.000.000,00

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.50.002.000,00
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.50.022.958,00
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.35.615.954,00
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rp.3.000.000,00
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu Rp.125.628.750,00
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.412.425.800,00
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp.12.000.000,00

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.577.204.000,00
- 2) Pengadaan Mebel Rp.22.000.000,00
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.347.712.625,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.22.500.000,00
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.450.750.000,00
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.4.360.000,00
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.300.934.800,00

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.186.850.000,00
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.45.000.000,00
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.85.069.000,00
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.17.000.000,00

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada 5 Kegiatan dan 18 sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp.310.000.000,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Rp.173.000.000,00

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp.389.970.000,00
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp.437.030.000,00

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp.330.000.000,00
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp.165.000.000,00
- 3) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Rp.92.000.000,00
- 4) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.163.000.000,00

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp.15.000.000,00 ;
- 2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda Rp.215.000.000,00
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Rp.303.531.000,00

- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR Rp.31.469.000,00
- 5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda Rp.30.000.000,00

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp.424.780.464.000,00
- 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp.1.972.500.000,00
- 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp.14.681.180.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Rp.100.000.000,00
- 2) Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.100.000.000,00

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Kegiatan merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengamanan BMD Rp.500.000.000,00
- 2) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD Rp.340.000.000,00
- 3) Penyusunan Laporan BMD Rp.47.000.000,00

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

;

Pada tanggal 23 September 2024 dilaksanakan perubahan perjanjian kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024. Sehingga perjanjian kinerja berubah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran IPKD	Indeks	80
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	99,15
1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09
		Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	64,00
1.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15
		Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	%	65

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.167.974.887,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 444.289.144.000,00
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 887.000.000,00

Secara rinci alokasi anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang pada penetapan APBD Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran BPKAD Kabupaten Pemalang pada Penetapan dan Perubahan APBD Tahun 2024

No	NAMA REKENING	TAHUN 2024	
		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4
	BELANJA	452.671.073.650	454.344.118.887
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.896.047.650	9.167.974.887
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>17.250.000</i>	<i>17.250.000</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	2.250.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.250.000	2.250.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.750.000	7.750.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000	2.250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.216.168.900	6.292.646.000
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.205.418.900	6.250.396.000
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	41.500.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000	110.000.000
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	125.000.000	110.000.000

No	NAMA REKENING	TAHUN 2024	
		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.628.750	688.698.462
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	50.002.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	50.022.958
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	35.615.954
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.000.000
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.628.750	125.628.750
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000	412.428.800
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	12.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	960.000.000	946.916.625
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	675.000.000	577.204.000
19	Pengadaan Mebel	10.000.000	22.000.000
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.000.000	347.712.625
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	822.000.000	778.544.800
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	22.500.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.000.000	450.750.000
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	4.360.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.000.000	300.934.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	222.000.000	333.919.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	186.850.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	45.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	85.069.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	17.000.000

No	NAMA REKENING	TAHUN 2024	
		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	440.828.026.000	444.289.144.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>1.378.000.000</i>	<i>1.310.000.000</i>
29	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	325.000.000	310.000.000
30	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	188.000.000	173.000.000
31	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	375.000.000	389.970.000
32	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	490.000.000	437.030.000
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>590.000.000</i>	<i>750.000.000</i>
33	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240.000.000	330.000.000
34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	150.000.000	165.000.000
35	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub kegiatan	80.000.000	92.000.000
36	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120.000.000	163.000.000
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>545.000.000</i>	<i>595.000.000</i>
37	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15.000.000	15.000.000
38	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	165.000.000	215.000.000
39	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	303.531.000	303.531.000

No	NAMA REKENING	TAHUN 2024	
		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	31.469.000	31.469.000
41	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	30.000.000	30.000.000
	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	438.115.026.000	441.434.144.000
42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	416.101.276.000	424.780.464.000
43	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.500.000.000	1.972.500.000
45	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.513.750.000	14.681.180.000
	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	200.000.000	200.000.000
46	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	100.000.000
47	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
	<i>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</i>	947.000.000	887.000.000
	<i>Pengelolaan Barang Milik daerah</i>	947.000.000	887.000.000
48	Pengamanan Barang Milik Daerah	500.000.000	500.000.000
49	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	400.000.000	340.000.000
50	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.000.000	47.000.000

Sumber : DPPA BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

3.1. Capaian Kinerja BPKAD

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024.

Analisa dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang kurang dari target, hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya target capaian kinerja. Analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) tahun berikutnya. Capaian kinerja yang tinggi dengan realisasi anggaran yang tidak tinggi mengindikasikan adanya penghematan pelaksanaan kegiatan. Begitu pun sebaliknya, apabila realisasi anggaran tinggi tetapi target kinerjanya tidak tercapai 100% maka menunjukkan kurang efisiennya pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang tidak efisien perlu dilakukan evaluasi agar ke depannya dapat berjalan lebih efektif, capaian kinerjanya lebih tinggi dan penggunaan anggarannya lebih efisien.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2.	76 – 90 %	Tinggi	T
3.	66 – 75 %	Sedang	S
4.	51 – 65 %	Rendah	R
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024

Hasil Pengukuran atas perjanjian kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80	70,1277	87,66	T	SK Gubernur No 900/39 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Kab/Kota di Provinsi Jateng TA 2023
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	99,15	99,13	99,98	ST	Data BMD yang disewakan dan data BMD yang dapat disewakan dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09	86,63	103,02	ST	Hasil SKM Tahun 2024
		Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	64,00	64,15	100,23	ST	LHE AKIP Tahun 2024
1.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15	6,5277	43,52	SR	SK Gubernur No 900/39 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Kab/Kota di Provinsi Jateng TA 2023
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20	15	75	S	SK Gubernur No 900/39 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Kab/Kota di Provinsi Jateng TA 2023
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15	4,0260	26,84	SR	SK Gubernur No 900/39 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Kab/Kota di Provinsi Jateng TA 2023
		Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	%	65	45,53	70,05	S	KIB Tanah dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Jumlah Tanah yang bersertifikat 911 bidang, Jumlah tanah yang dimiliki Pemda 2.001 bidang.

Sumber : Laporan Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Tim Penilai IPKD untuk Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota adalah Tim Provinsi. Sedangkan Tim Penilai IPKD untuk Provinsi adalah Tim dari Kemendagri. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan SK Gubernur sesuai dengan klaster Indeks kapasitas fiskal masing-masing Kabupaten/Kota. Klasterisasi Indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebesar 0,746 dengan kategori sangat rendah. Walaupun kategori kapasitas fiskal daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 dan 2024 sama tetapi secara nominal Rasio Kapasitas Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 lebih rendah dari Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 atau turun sebesar 0,201. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pemalang dari tahun 2018 sampai dengan 2024 menunjukkan grafik yang menurun. Hal ini disebabkan adanya beberapa komponen kapasitas fiskal daerah yang belum optimal dicapai oleh Kabupaten Pemalang.

Rumus penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio KFD} = \frac{(\text{Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan tertentu}) - (\text{Pendapatan earmark} + \text{Belanja earmark} + \text{Pengeluaran Pembiayaan tertentu})}{\text{Belanja Pegawai}}$$

Dari rumus penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Pemalang belum optimal sehingga hasil pengurangan dengan pendapatan earmark, belanja earmark dan pengeluaran pembiayaan earmark tidak begitu besar. Apalagi bila dibandingkan dengan belanja pegawai kabupaten pemalang yang cukup besar maka akan menambah penurunan IKFD Kabupaten Pemalang. Berdasarkan

hasil penghitungan oleh Kementerian Keuangan maka Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pemalang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 s/d 2024

Tahun Anggaran	IKFD	Kategori	Dasar Penetapan (Peraturan Menteri Keuangan)
2018	1,161	Tinggi	PMK Nomor : 107/PMK.07/2018
2019	1,333	Tinggi	PMK Nomor : 126/PMK.07/2019
2020	1,330	Tinggi	PMK Nomor : 120/PMK.07/2020
2021	1,217	Tinggi	PMK Nomor : 116/PMK.07/2021
2022	0,927	Sangat Rendah	PMK Nomor : 193/PMK.07/2022
2023	0,873	Sangat Rendah	PMK Nomor 84 Tahun 2023
2024	0,746	Sangat Rendah	PMK Nomor 65 Tahun 2024

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan pada Kategori Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan. Pada Tahun 2024, Kabupaten Pemalang masuk kategori kapasitas fiskal daerah sangat rendah sehingga pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang dikelompokkan dengan kabupaten yang memiliki kluster kapasitas fiskal daerah sama (Rendah/sangat rendah).

Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun hasil pengukuran IPKD kabupaten pemalang dari tahun 2018 sampai dengan 2023 berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran IPKD Tahun 2018 s/d 2023

Tahun Anggaran	IPKD	Nilai	Peringkat	Interval Peringkat
2018	68,7411	A	Baik	$MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD$
2019	61,9133	B	Perlu Perbaikan	$MEAN - (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD < MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi})$
2020	65,0394	B	Perlu Perbaikan	$MEAN - (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD < MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi})$
2021	62,5009	B	Perlu Perbaikan	$MEAN - (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD < MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi})$
2022	65,7108	B	Perlu Perbaikan	$MEAN - (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD < MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi})$
2023	70,1277	B	Perlu Perbaikan	$MEAN - (1 \times \text{Standar Deviasi}) < IPKD < MEAN + (1 \times \text{Standar Deviasi})$

Sumber : Sistem Informasi Pengukuran IPKD yang dibangun Kementerian Dalam Negeri

Hasil Pengukuran IPKD dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 80. Tools yang digunakan untuk mengukur IPKD adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib entri data IPKD per dimensi serta mengupload dokumen pendukung pada aplikasi IPKD. Data yang di entri dan dokumen yang di upload oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke sistem IPKD, diverifikasi oleh Tim Pengukur IPKD dari Provinsi. IPKD terdiri dari 6 Dimensi yaitu :

1. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran). Pada dimensi 1, perangkat daerah yang terlibat adalah BAPPEDA dan BPKAD. Dimensi ini membandingkan nama program dan nominal program antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Bappeda bertanggungjawab pada data dan dokumen pendukung RPJMD dan RKPD, sedangkan BPKAD bertanggungjawab pada data dan dokumen pendukung KUA-PPAS dan APBD. Dimensi 1 menilai konsistensi Pemda dalam Perencanaan dan Penganggaran. Tanggungjawab BPKAD atas kesesuaian nama program dan nominal program antara dokumen KUA-PPAS dan APBD menjadi Indikator sasaran yang diampu oleh Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Pemalang.

Hasil Pengukuran pada Dimensi 1 IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebesar 6,5277 dari target yang ditetapkan sebesar 15.

2. Dimensi 2 (Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD terkait dengan Mandatory Spending dan Standar Pelayanan Minimal). Perangkat Daerah yang terlibat pada Dimensi 2 adalah Dinas Sosial KBPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPUTR, Disperkim, BPBD, Satpol PP dan BPKAD. Dimensi 2 menilai konsistensi Pemda dalam melaksanakan mandatory spending terkait penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan minimal sebesar 20%, penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan minimal sebesar 10% diluar gaji, penyediaan alokasi anggaran belanja untuk Infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Pengukuran Dimensi 2 IPKD Kabupaten

Pemalang tahun 2023 sebesar 19,8276 dari target yang ditetapkan sebesar 20.

3. Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah). Transparansi ini terkait dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diupload ke website Pemda. Perangkat Daerah yang terlibat dalam Dimensi 3 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Perekonomian Setda Kab Pemalang, BAPPEDA, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kab Pemalang dan Bagian Organisasi setda Kabupaten Pemalang. Perangkat Daerah tersebut mempunyai tanggungjawab masing-masing atas 29 dokumen yang diupload ke Website Pemda yaitu :

1. Ringkasan Dokumen RKPD;
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
3. Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS);
4. Ringkasan Dokumen RKA SKPD;
5. Ringkasan Dokumen RKA SKPKD;
6. Ringkasan Dokumen Raperda tentang APBD;
7. Perda tentang APBD;
8. Perkada tentang Penjabaran APBD;
9. Ringkasan DPA SKPD
10. Ringkasan DPA SKPKD;
11. Realisasi Pendapatan Daerah;
12. Realisasi Belanja Daerah;
13. Realisasi Pembiayaan Daerah;
14. Ringkasan Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD;
15. Perda tentang Perubahan APBD;
16. Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD;
17. Ringkasan RKA/DPA Perubahan;
18. Rencana Umum Pengadaan (RUP);
19. SK tentang Penunjukkan PPKD;
20. Perkada tentang Kebijakan Akuntansi;
21. Laporan Arus Kas;
22. LRA-SKPD;
23. LRA-SKPKD;

24. Neraca;
25. CALK Pemda;
26. Laporan Keuangan BUMD/Perusda;
27. LKjIP Pemda;
28. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
29. Hasil Opini BPK.

Dimensi 3 menilai ketepatan waktu penyajian dokumen dan keteraksesan dokumen pada Website Pemda. Ketepatan waktu penyajian dokumen mendapat nilai baik (Nilai 1) apabila dokumen yang dipersyaratkan tersedia dan disajikan dalam situs jaringan resmi Pemda paling lambat 30 hari setelah ditetapkan. Sedangkan keteraksesan diberi nilai baik (Nilai 1) apabila Dokumen yang dipersyaratkan mudah diakses secara umum dan terbuka untuk publik. Hasil Pengukuran Dimensi 3 IPKD Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 14,7414 dari target sebesar 15.

4. Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran Daerah berdasarkan jenis belanja)

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas entrian Dimensi 4 adalah BPKAD. Dimensi 4 mengukur Penyerapan anggaran dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi per jenis belanja. Penyerapan anggaran diberi nilai baik (Nilai 1) apabila penyerapan anggaran minimal 80% dari masing-masing jenis belanja yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dimensi ini dijadikan sebagai Indikator sasaran BPKAD yang diampu oleh Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Pemalang. Hasil Pengukuran Dimensi 4 IPKD Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 15 dari target sebesar 20. Hal ini disebabkan penyerapan anggaran Belanja Tidak terduga yang tidak mencapai 80%.

5. Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah)

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada Dimensi 5 adalah BPKAD. Dimensi 5 mengukur Kondisi Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 Komponen yaitu :

a) Kemandirian Keuangan;

Kemandirian Keuangan merupakan kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya. Kemandirian Keuangan membandingkan Total PAD dengan Total Pendapatan Daerah.

b) Fleksibilitas Keuangan;

Fleksibilitas Keuangan merupakan suatu kondisi Pemda yang dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (debt capacity). Fleksibilitas Keuangan membandingkan Total Pendapatan Daerah setelah dikurangi DAK dengan jumlah Kewajiban dan Belanja Pegawai.

c) Solvabilitas Operasional;

Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan Pemda dalam menghasilkan pendapatan untuk menutup beban operasional Pemda selama Periode Anggaran. Solvabilitas Operasional membandingkan Hasil Pengurangan Total Pendapatan LO dikurangi Pendapatan DAK LO selanjutnya dibandingkan dengan Total Beban LO.

d) Solvabilitas Jangka Pendek;

Solvabilitas Jangka Pendek merupakan kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Solvabilitas Jangka Pendek membandingkan penjumlahan Kas dan Setara Kas dengan Investasi Jangka Pendek dibandingkan dengan Kewajiban Lancar.

e) Solvabilitas Jangka Panjang;

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan Pemda dalam memenuhi kewajiban Jangka Panjang (lebih dari 1 Tahun). Solvabilitas Jangka Panjang membandingkan Total Aset tetap dengan Kewajiban Jangka Panjang.

f) Solvabilitas Layanan.

Solvabilitas Layanan merupakan kemampuan Pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Solvabilitas Layanan

membandingkan Total Aset Tetap dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun pengukuran.

Kondisi Keuangan Daerah menjadi salah satu Indikator Sasaran BPKAD yang diampu oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Hasil Pengukuran Dimensi 5 IPKD Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebesar 4,0260 dari target sebesar 15.

6. Dimensi 6 (Opini BPK atas LKD)

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada Dimensi 6 adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang terkait dengan Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Pemkab Pemalang audited. Dimensi 6 menilai hasil opini BPK RI selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. Pada 3 Tahun terakhir, hasil opini BPK atas LKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah WTP, WDP dan WTP. Atas kondisi tersebut maka hasil pengukuran Dimensi 6 IPKD Kabupaten pemalang tahun 2023 sebesar 10,0050 dari target 15.

Pengukuran IPKD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Pengukuran IPKD berlaku untuk semua Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Pengukuran IPKD Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan Pengukuran IPKD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Tim Provinsi masing-masing, sesuai wilayahnya.

Hasil Pengukuran IPKD Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024, hasil, pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/39 TAHUN 2024. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023
yang dilaksanakan pada Tahun 2024

URAIAN	TARGET	HASIL PENGUKURAN
Dimensi 1	15	6,528
Dimensi 2	20	19,8276
Dimensi 3	15	14,7414
Dimensi 4	20	15,00
Dimensi 5	15	4,0260
Dimensi 6	15	10,00
IPKD Kab Pemalang	80	70,1277
Predikat		Perlu Perbaikan
Nilai		B
Rata-Rata Nasional		71,3182
Standar Deviasi Nasional		6,5124

Sumber : SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/39 TAHUN 2024

Berdasarkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 tersebut dapat dilihat bahwa Dimensi yang realisasinya paling jauh dari target adalah Dimensi 5. Dimensi 5 mengukur kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dimensi ini perlu effort yang lebih besar agar realisasinya mencapai target yang ditetapkan.

2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

Indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kedua adalah Persentase Pemanfaatan BMD dengan target 99,15%. Indikator tujuan ini menghitung berapa besar BMD yang telah dimanfaatkan dengan sistim sewa, dibandingkan dengan potensi BMD yang dapat disewakan. Tidak banyak berbeda dengan Tahun 2023, Pada Tahun 2024 terdapat potensi BMD yang dapat disewakan sebanyak 343 lokasi. Sedangkan BMD yang telah disewakan sebanyak 340 lokasi. Sehingga realisasi indikator tujuan Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebesar $(340/343 \times 100\%) = 99,13\%$. Data aset daerah yang disewakan secara rinci tercantum pada tabel berikut :

1
Tabel 3.6
DAFTAR POTENSI BARANG MILIK DAERAH YANG DAPAT DISEWAKAN
TAHUN 2024

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
2	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
3	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
4	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
5	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
6	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
7	RW.07 DUKUH KANDANG KEBO KELURAHAN PADURAKSA	DISEWAKAN	
8	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
9	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
10	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
11	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
12	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
13	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
14	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
15	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
16	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
17	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
18	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
19	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
20	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
21	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
22	DI SEBELAH BARAT LAPANGAN PAGARAN (JL. Lakda Yos Sudarso) KEL. PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
23	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
24	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
25	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
26	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
27	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
28	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
29	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
30	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
31	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
32	Jl Urip Sumoharjo RT 001 Rw 008 Kel Pelutan / Stor sewa tanah di jl urip sumoharjo kel pelutan periode bln mei 2021 sd bln april 2023	DISEWAKAN	
33	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
34	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
35	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
36	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
37	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
38	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
39	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
40	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
41	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
42	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG ;	DISEWAKAN	
43	DI JL. URIP SUMOHARJO KELURAHAN PELUTAN PEMALANG	DISEWAKAN	
44	Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
45	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MUYOHARJO	DISEWAKAN	
46	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MUYOHARJO	DISEWAKAN	
47	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
48	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
49	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
50	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
51	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
52	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
53	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	.
54	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
55	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
56	Jl Agung dalam rt 006 / rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
57	Jl Tangkuban Perahu Rt 006 / Rw 005 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
58	Mulyoharjo rt 006 / rw 005 Kel Mulyoharjo / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	.
59	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
60	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
61	Rt 007 / Rw 004 Kelurahan Mulyoharjo / sewa tanah diblok capit urang mulyoharjo periode agustus 2022 sd juli 2024	DISEWAKAN	
62	SEWA DI BLOK CAPIT URANG KELURAHAN MULYOHARJO	DISEWAKAN	
63	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	
64	Jl Tangkuban Perahu Rt 007 / Rw 004 / Sewa tanah di Blok Capit Urang Mulyoharjo Periode Agustus 2022 sd Juni 2024	DISEWAKAN	.
65	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
66	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
67	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
68	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
69	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
70	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
71	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
72	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
73	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
74	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
75	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
76	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
77	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
78	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
79	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
80	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
81	Sewa Menyewa tanah milik pemkab ; pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
82	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
83	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
84	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
85	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
86	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
87	Sewa Menyewa tanah milik pemkab ; pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
88	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
89	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
90	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
91	Sewa Menyewa tanah milik pemkab pemalang depan lapangan mulyoharjo kelurahan mulyoharjo	DISEWAKAN	
92	Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
93	Kelurahan Pelutan	DISEWAKAN	
94	Kelurahan Kebondalem ;	DISEWAKAN	
95	Kelurahan Sugihwaras	DISEWAKAN	
96	Kelurahan Beji	DISEWAKAN	
97	Kelurahan Petarukan	DISEWAKAN	
98	Kelurahan Purwoharjo	DISEWAKAN	
99	Kelurahan Bojongbata	DISEWAKAN	
100	Kelurahan Wanarejan Selatan	DISEWAKAN	
101	Kelurahan Mulyoharjo 001	DISEWAKAN	
102	Kelurahan Mulyoharjo 002	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
103	Kelurahan Mulyoharjo 003	DISEWAKAN	
104	Kelurahan Mulyoharjo 004	DISEWAKAN	
105	Kelurahan Mulyoharjo 005	DISEWAKAN	
106	Kelurahan Mulyoharjo 006	DISEWAKAN	
107	Kelurahan Mulyoharjo 007	DISEWAKAN	
108	Kelurahan Mulyoharjo 008	DISEWAKAN	
109	Kelurahan Mulyoharjo 009	DISEWAKAN	
110	Kelurahan Mulyoharjo 010	DISEWAKAN	
111	Kelurahan Beji 02	DISEWAKAN	
112	Kelurahan Beji 03	DISEWAKAN	
113	Kelurahan Beji 01	DISEWAKAN	
114	Kelurahan Kebondalem 01	DISEWAKAN	
115	Kelurahan Kebondalem 02	DISEWAKAN	
116	Kelurahan Kebondalem 03	DISEWAKAN	
117	Kelurahan Wanarejan Selatan 01	DISEWAKAN	
118	Kelurahan Wanarejan Selatan 02	DISEWAKAN	
119	Kelurahan Wanarejan Selatan 03	DISEWAKAN	
120	Kelurahan Pelutan 01	DISEWAKAN	
121	Kelurahan Pelutan 02	DISEWAKAN	
122	Kelurahan Pelutan 03	DISEWAKAN	
123	Kelurahan Pelutan 05	DISEWAKAN	
124	Kelurahan Pelutan 07	DISEWAKAN	
125	Taman Pemalang 002	DISEWAKAN	
126	Wanarejan Selatan 002	DISEWAKAN	
127	Wanarejan Utara 001	DISEWAKAN	
128	Wanarejan Utara 002	DISEWAKAN	
129	Kabunan 002	DISEWAKAN	
130	Wanarejan Selatan 003	DISEWAKAN	
131	Jl Kemuning no 39 Kelurahan Mulyoharjo / Sewa tanah di Terminal Belik, An. Irfan	DISEWAKAN	
132	Direktur Utaman Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia / Pembayaran sewa PDAM Blok Sibanteng selama 3 tahun	DISEWAKAN	
133	Jl Jendral Sudirman No 78 Kecamatan Pemalang / Sewa tanah di halaman puskesmas rowosari kec. Ulujami periode maret 2022 sd maret 2025 3 tahun	DISEWAKAN	
134	Rt 05 Rw 06 Widuri Asri Pemalang / stor sewa kios (30kios) yang terletak dikawasan objek wisata widuri selama 10 hari	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
135	Desa Purwosari Rt 02 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
136	Kelurahan Purwoharjo Rt 09 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
137	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
138	Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
139	Ds Gumawang Rt 12 Rw 04 Wiradesa / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
140	Dusun Kawedenan Desa Rowosari Rt 05 Rw 06 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
141	Sukorejo Rt 02 Rw 01 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
142	Dusun Slastri Rt 16 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
143	Dusun 4 Rowosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
144	Dusun Situnggal sikayu Rt 03 Rw 01 Sikayu Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
145	Dusun 4 Purwosari Rt 02 Rw 09 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
146	Desa Sidorejo Rt 04 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
147	Desa Pendowo Rt 05 Rw 04 Bodeh / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
148	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
149	Desa Purwoharjo Rt 08 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
150	Desa Pesandangan Rt 01 Rw 07 Ujunggede / Stor kios dishub	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	terminal comal selama 1 tahun		
151	Dusun Balutan Rt 10 Rw 04 Purwosari / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
152	Dusun Balutan Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
153	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
154	Dusun Purwoharjo Rt 01 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
155	Desa Kauman Rt 04 Rw 01 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
156	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
157	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
158	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
159	Desa Padek RT 12 RW 04 Ulujami / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
160	Kelurahan Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
161	Desa Purwoharjo Rt 04 Rw 04 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
162	Dusun Pecangakan Rt02 Rw 05 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
163	Dusun Pecangakan Rt 08 Rw 03 Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
164	Dusun Balutan Rt 08 Rw 04 Purwoharjo Comal / Stor kios dishub terminal comal selama 1	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	tahun		
165	KEL PURWOHARJO / Stor kios dishub terminal comal selama 1 tahun	DISEWAKAN	
166	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
167	Stor lahan di Jl Tangkuban Perahu Rt 003 Rw 007 Kel Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
168	Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas di Jl Mandala 1 no 3 Kec Mulyoharjo.	DISEWAKAN	
169	Sewa Tanah Milik Pemerintah Kab Pemalang di Jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pemalang.	DISEWAKAN	
170	Sewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banjaranyar Kec Randudongkal Milik Pemerintah Kab Pemalang Periode Mei 2022 sd Mei 2023	DISEWAKAN	
171	Eks Bioskop Sri Indra Mulyoharjo / Sewa menyewa tanah milik pemerintah kab. Pemalang di Eks Bioskop Sri Indah Kab Pemalang Periode Nov 2021 sd Oktober 2023	DISEWAKAN	
172	Rt 01 Rw 03 Mejugong Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
173	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
174	Rt 36 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
175	Rt 41 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
176	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
177	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
178	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
179	Rt 003 Rw 003 Sikasur Belik Dk Sodong / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
180	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
181	Rt 01 Rw 04 Kedungbanteng Banyumas / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
182	Rt 11 Rw 03 Karangmoncol Kec Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
183	Rt 31 Rw 04 Kel Randudongkal/ Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
184	Rt 55 Rw 05 Kel Randudongkal / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
185	Rt 04 Rw 03 Pegiringan Bantarbolang / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
186	Rt 05 Rw 03 Kelurahan Rowokembu Pekalongan / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
187	RT 01 RW 02 KEL PECANGAKAN / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
188	KEL. PAMUTIH KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
189	DS. KEDUNGASARI KEC. AMPELGADING / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
190	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
191	KEL. KAYU PUTIH KEC. PULOGADUNG / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
192	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
193	KEL. KRAWINGAN KEC. BODEH / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
194	KEL. LOWA KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
195	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
196	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
197	DS. WIYOROWETAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
198	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
199	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
200	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
201	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
202	KEL. LIMBANGAN KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
203	DS. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
204	KEL. SIDOREJO KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
205	KEL. SAMBOREJO KEC. TIRTO / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
206	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
207	KEL. ROWOSARI KEC. ULUJAMI / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
208	KEL. PECANGAKAN KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
209	KEL. PURWOSARI KEC. COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
210	KEL. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
211	DS. KAUMAN KEC.COMAL / Sewa Petak Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
212	RT 02 RW 03 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
213	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
214	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
215	DS BANYUMUDAL KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
216	RT 03 RW 01 DS WANGKELANG KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
217	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
218	JL MAWAR RT 02 RW 01 MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
219	RT 03 RW 01 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
220	KRAJAN BARAT RT 04 RW 01 BANYUMUDAL / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
221	RT 01 RW 03 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
222	JL SOKA RT 01 RW 01 KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
223	DS PAMULIHAN RT 07 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
224	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
225	DS PAMULIHAN RT 10 RW 05 WARUNGPRING / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
226	RT 01 RW 05 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
227	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
228	RT 05 RW 04 BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
229	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
230	JL BAKUNG RT 03 RW 06 MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
231	RT 01 RW 08 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
232	RT 01 RW 04 DS MOGA KEC MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
233	RT 06 RW 08 DS BANYUMUDAL MOGA / Sewa Petak kios di komplek SUB Terminal Moga periode 30 Agustus 2022 sd 30 Agustus 2023	DISEWAKAN	
234	sewa menyewa tanah milik pemerintah kab pemalang pada halaman DPMPSTP/ATM-BPD	DISEWAKAN	
235	Sewa menyewa tanah milik pemkab yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo, Kec Pemalang, Kab Pemalang Periode 1 th (21Nov 2022-21Nov 2023)	DISEWAKAN	
236	PTAU / Sewa menyewa tanah milik pemkab pemalang di Desa Nyamplungsari Kec Petarukan 5th (1januari 2023 - 31desember 2027)	DISEWAKAN	
237	Sewa menyewa tanah di belakang gedung kridanggo milik pemkab pml	DISEWAKAN	
238	Dukuh Krajan Wetan RT 09 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
239	RT 05 RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
240	Dukuh Karang Pule RT 01/RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
241	Dusun Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
242	Dusun Krajan Timur RY 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
243	RT 03 RW 02 Beluk Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
244	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
245	Dusun Penepen Karang Pule RT 03 RW 02 Mendelem Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
246	Dukuh Pengilon RT 01 RW 07 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
247	Dukuh Rimpak RT 01/RW 06 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
248	RT 04/RW 01 Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	
249	Kuta Lor RT 43/RW 01 Kuta Kec. Belik / Sewa Patok TOKO Terminal Belik	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
250	Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang / Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata	DISEWAKAN	
251	Jl Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Pemalang/ Perpanjangan sewa menyewa tanah di Jalan Tangkuban Perahu Kel Mulyoharjo Pemalang	DISEWAKAN	
252	RT 01 RW 01 Desa Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
253	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
254	Ds. Pamutih Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
255	Kel Rowosari Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
256	Ds. Wiyorowetan Kec. Ulujami / Sewa Patok Kios di Sub Terminal Grosir Comal	DISEWAKAN	
257	SUGIHWARAS / Sewa menyewa tanah di Blok Pasar Sayur Kelurahan Mulyoharjo	DISEWAKAN	
258	PTAU / Perpanjangan sewa menyewa gedung serbaguna	DISEWAKAN	
259	Sewa Menyewa tanah dan bangunan di Jl Gatot Subroto depan taman kota comal	DISEWAKAN	
260	Perpanjangan sewa tanah di jalan Tangkuban Prau Kel Mulyoharjo Kec Pemalang	DISEWAKAN	
261	KONI / Perpanjangan sewa gedung kridanggo (KONI) 1th	DISEWAKAN	
262	YAYASAN MBAH JOKO RIPO / Perpanjangan sewa menyewa di Jl Kartini gang brantas 11 Rt 02 Rw 08 Kauman Petarukan	DISEWAKAN	
263	RT 01 RW 03 MEJAGONG RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
264	RT 36 RW 4 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
265	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Terminal Randudongkal		
266	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
267	RT 50 RW 06 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
268	RT 55 RW 05 DESA RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
269	RT 10 RW 02 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
270	RT 09 RW 01 SEMINGKIR / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
271	RT 05 RW 01 PODOSUGIH PEKALONGAN / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
272	RT 30 RW 04 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
273	RT 54 RW 05 RANDUDONGKAL / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
274	KARANGBULU RT 02 RW04 KEC MOGA / Sewa Petak Kios Terminal Randudongkal	DISEWAKAN	
275	PDAM BLOK SIBANTENG / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok Sibanteng belakang PDAM Kelurahan Bojongbata Kec. Pemalang	DISEWAKAN	
276	PDAM RANDUDONGKAL / Perpanjangan sewa tanah milik Pemkab Blok 36 persil 132 Desa Randudongkal Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	DISEWAKAN	
277	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI/ Sewa sebagian tanah milik Pemkab yang terletak di Rt 21 / Rw 06 Desa Banjaranyar Randudongkal	DISEWAKAN	
278	Sewa tanah milik pemkab yg terletak di Blok Sanggeman Desa Kalirandu Kec Petarukan Kab Pemalang	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
279	Sewa tanah milik pemkabb pemalang yang terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo Kec Pemalang (20 hari)	DISEWAKAN	
280	Perubahan besaran sewa sebagian tanah milik pemkab pml yg terletak di Blok Gumelem Kel Mulyoharjo (Prima Medika)	DISEWAKAN	
281	Pembayaran Sewa Tanah di Jalan Ir. Sutami Kel. Bojongbata Ketua Cabang Aisyiyah Kecamatan Pemalang	DISEWAKAN	
282	Sewa Tanah Milik Pemkab Pemalang yang terletak di Blok Siwareng Siwatu Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab Pemalang (PT HWA SEUNG)	DISEWAKAN	
283	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab di Blok Gempol Persil 84/S2 Kab. Pemalang	DISEWAKAN	
284	Sewa menyewa MCK di Terminal Randudongkal Milik Pemkab Pemalang	DISEWAKAN	
285	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Halaman Kec Pulosari (PT BPR BKK JATENG)	DISEWAKAN	
286	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 1	DISEWAKAN	
287	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 2	DISEWAKAN	
288	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 3	DISEWAKAN	
289	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 4	DISEWAKAN	
290	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 5	DISEWAKAN	
291	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 6	DISEWAKAN	
292	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 7	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
293	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 8	DISEWAKAN	
294	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 9	DISEWAKAN	
295	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di selatan Kantor SAMSAT Ruko 10	DISEWAKAN	
296	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
297	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
298	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
299	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
300	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
301	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
302	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
303	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
304	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
305	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
306	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
307	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
308	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
309	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
310	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
311	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
312	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
313	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
314	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
315	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
316	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Ruko Jalan Anggur Bojongbata	DISEWAKAN	
317	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
318	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
319	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
320	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
321	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
322	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
323	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
324	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
325	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
326	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
327	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
328	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
329	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
330	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
331	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
332	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
333	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu, Mulyoharjo	DISEWAKAN	
334	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	

No.	LOKASI ASET	STATUS SEWA	KETERANGAN
1	2	3	4
335	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
336	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu, Mulyoharjo	DISEWAKAN	
337	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
338	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
339	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
340	Perpanjangan sewa menyewa tanah milik Pemkab yang terletak di Blok Capit Urang Jalan Tangkupan Prahu Mulyoharjo	DISEWAKAN	
341	Tanah di Desa Bantarbolang	BELUM DISEWAKAN	±60 Objek Sewa
342	Jl Kyai Makmur	BELUM DISEWAKAN	Belakang Kantor Wakil
343	Jl Ahmad Yani	BELUM DISEWAKAN	Ex Bioskop Indra

Sumber : Data aset daerah yang disewakan dari Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur kepuasan masyarakat atau stakeholder dalam hal menerima pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan BPKAD pada akhir Tahun 2024. Jawaban survey kepuasan masyarakat melalui google form direkap per komponen. Rekap nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2024, IKM BPKAD telah mencapai target yang ditetapkan. Pada semester 1 Tahun 2024, hasil survey kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 84,73. Sedangkan pada semester 2 Tahun 2024, hasil SKM sebesar 88,54. Sehingga hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah :

$$\frac{(84,73 + 88,54)}{2} = 86,63$$

Berdasarkan hasil survey semester 1 dan semester 2 Tahun 2024, semua komponen SKM BPKAD telah mencapai kategori baik. Hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk mencapainya dan tidak mudah pula untuk mempertahankannya.

Gambar 4
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	83,33	Baik
2	Prosedur	81,67	Baik
3	Waktu Pelayanan	82,50	Baik
4	Biaya/Tarif	91,67	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi	86,67	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	87,50	Baik
7	Perilaku Pelaksana	83,52	Baik
8	Sarana dan Prasarana	79,17	Baik
9	Penanganan Pengaduan	81,67	Baik
	IKM	84,73	BAIK

Gambar 5
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER 2 TAHUN 2024

No	Unsur Layanan	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Persyaratan	86,05	Baik
2	Prosedur	87,79	Baik
3	Waktu Pelayanan	87,79	Baik
4	Biaya/Tarif	93,02	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi	88,37	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	92,44	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	91,86	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	87,21	Baik
9	Penanganan Pengaduan	83,14	Baik
IKM		88,54	SANGAT BAIK

Masalah, kendala dan solusi atas ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

Masalah :

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan survey yang rutin dan responden yang sama menyebabkan SKM tidak lagi menghasilkan data yang valid. Terkesan SKM dilaksanakan hanya untuk memenuhi kewajiban. Responden pada perangkat daerah saling bergantian merespon masing-masing kuesioner SKM.

Kendala :

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan amanat regulasi yang harus dipatuhi. Jenis pertanyaan pada kuesioner yang harus direspon oleh reponden dari tahun ke tahun tetap. Pertanyaan pada kuesioner baku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga perangkat daerah tidak dapat berkreasi terkait pertanyaan yang perlu direspon oleh responden/stakeholder/pengguna layanan. Pertanyaan yang terstandar tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara detail.

Solusi :

Terkait dengan responden yang tetap, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang telah melakukan Solusi dengan melakukan pengadaan alat survey otomatis. Setiap pengguna layanan yang berkunjung ke BPKAD, diminta mengisi survey lewat alat survey tersebut. Sehingga responden SKM merupakan pengguna layanan riil. Dengan mekanisme penjangkaran responden seperti itu, diharapkan hasil SKM lebih valid.

4. Nilai SAKIP BPKAD

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pematang. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerjanya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang pada Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pematang Nomor : 700/827/RHS/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah 56,84 dengan kategori CC. Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten

Pemalang Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang naik menjadi 60,26 dengan kategori B (Baik). Kemudian pada tahun 2021, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, capaian nilai SAKIP BPKAD sebesar 61,92 dengan kategori B (Baik). Selanjutnya pada Tahun 2022, capaian nilai SAKIP BPKAD sebesar 62,15 dengan kategori B (Baik), berdasarkan LHE AKIP Nomor : 700/29/EVS/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nilai SAKIP Tahun 2023 berdasarkan LHE Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebesar 63,25 dengan kategori B (Baik). Kemudian pada Tahun 2024, berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Pemalang nomor : 700/206/EVS/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, nilai SAKIP BPKAD sebesar 64,15.

Nilai SAKIP BPKAD sebelumnya merupakan indikator program. Seiring dengan berjalannya waktu dan menimbang bahwa Nilai SAKIP tidak hanya menjadi tanggungjawab sekretaris perangkat daerah saja tetapi merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya, maka Nilai SAKIP dinaikkan menjadi indikator sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain penggeseran Nilai SAKIP yang semula sebagai indikator program penunjang urusan pemerintahan menjadi indikator sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Target nilai SAKIP BPKAD pun ditingkatkan. Target Nilai SAKIP BPKAD pada perubahan perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 semula 60,60 dinaikkan menjadi 64,00. Hal ini dilakukan karena realisasi nilai SAKIP BPKAD dari tahun 2019 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, dirasa perlu untuk meningkatkan target nilai SAKIP pada Tahun 2024. Adapun target dan realisasi nilai SAKIP BPKAD dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Nilai SAKIP BPKAD
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG	Tahun yang di Evaluasi	KOMPONEN SAKIP					Nilai SAKIP BPKAD
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Capaian Kinerja	
Nomor : 700/827/RHS/2019 Tanggal : 6 Mei 2019	2019	23,19	15,63	7,15	0,63	10,25	56,84
Nomor: 700/194/VI/2020 Tanggal : 10 Juni 2020	2020	23,19	15,63	7,15	0,80	13,50	60,26
Nomor: 700/56/EVS/2021 Tanggal : 12 Agustus 2021	2021	23,19	15,63	7,15	1,21	14,75	61,92
Nomor: 700/29/EVS/2022 Tanggal : 20 Juli 2022	2022	21,60	18,00	10,05	12,50	-	62,15
Nomor : 700/029/EVS/VI/2023 Tanggal : 21 Juni 2023	2023	21,00	19,50	9,75	13,00	-	63,25
Nomor : 700/206/EVS/VI/2024 Tanggal 13 Juni 2024	2024	21,00	19,83	9,82	13,50	-	64,15

Sumber : LHE Inspektorat

Catatan :

Capaian Kinerja sejak tahun 2022 tidak masuk komponen SAKIP sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran;

Indikator ini merupakan salah satu komponen dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dalam hal kesesuaian Dokumen Penganggaran adalah membandingkan Nama Program dan Nominal Program yang tercantum pada KUA PPAS dengan Nama Program dan Nominal Program yang tercantum pada APBD. Apabila terdapat perbedaan nama program atau perbedaan nominal program antara KUA PPAS dan APBD diberi nilai 0 (Nol). Sedangkan apabila Nama Program dan Nominal Program antara KUA PPAS dan APBD sama maka diberi nilai 1. Jumlah nilai dibagi jumlah program dikalikan 15 merupakan hasil pengukuran kesesuaian dokumen penganggaran. Angka 15 merupakan Nilai Dimensi 1 yang merupakan salah satu Komponen IPKD dari sisi perencanaan dan penganggaran, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD. Penggunaan nama program, kegiatan dan sub kegiatan pada penyusunan APBD Tahun 2023 mempedomani regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020. Sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan Nama Program antara KUA PPAS dan APBD. Sehingga dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran kesesuaian dokumen penganggaran tahun 2023, dipengaruhi oleh perbedaan pagu program antara KUA PPAS dan APBD. Target Indikator Sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran adalah 15. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi atas IPKD Kabupaten/Kota maka realisasi indikator ini sebesar 6,5277 atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan :

Ketercapaian Indikator sasaran berupa Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran belum optimal dengan bobot nilai 6,5277 dari target bobot nilai 15. Untuk mencapai target Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengalokasikan dana APBD. Konsistensi pengalokasian anggaran mulai dari KUA PPAS sampai dengan APBD merupakan komponen penilaian yang tinggi dalam ketercapaian Indikator

Sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran. Konsistensi mulai dari perencanaan (yang didukung dengan dokumen RPJMD dan RKPD) dengan penganggaran (yang didukung dengan dokumen KUA-PPAS dan APBD) harus dikedepankan, untuk mendapatkan bobot nilai yang ditargetkan pada Indikator Sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran.

Kendala :

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target Indikator kesesuaian Dokumen Penganggaran adalah :

- a) Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengalokasikan anggaran sehingga menghasilkan postur APBD yang ideal dan mencukupi kebutuhan masyarakat, dipengaruhi banyak hal antara lain : politik, mandatory spending dan kebijakan pemangku kepentingan. Hal ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap konsistensi dalam penyusunan Dokumen KUA PPAS dan APBD. Kesinkronan nama program serta konsistensi nominal program antara Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBD dapat tercapai apabila dalam rentang waktu antara penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan APBD tidak ada kebijakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran.
- b) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat ke Daerah yang belum termasuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi Dana Bagi Hasil. Hal ini mengharuskan Pemda untuk menyesuaikan dokumen penganggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan.
- c) Adanya kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terkait penyaluran Bantuan Keuangan untuk TMMD dan Bantuan Keuangan lainnya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, dimana ketetapan nominal penyaluran baru diketahui setelah penetapan APBD Kabupaten Pemalang.

Solusi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan Kementrian Keuangan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah terkait penyaluran Dana

Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara intens memberi masukan kepada TAPD terkait perlunya konsistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran.

6. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), salah satu Komponen IPKD adalah Penyerapan Anggaran. Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan per jenis belanja. Apabila realisasi anggaran dari jenis belanja tersebut kurang dari 80% maka diberi nilai 0 (nol). Sedangkan untuk realisasi belanja yang lebih dari 80% diberi nilai 1 (satu).

Pada Pengukuran IPKD yang dilaksanakan pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja di Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rincian Anggaran dan Realisasi per jenis Belanja
Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2023

*(Pengukuran IPKD yang dilaksanakan tahun 2024,
berdasarkan LKPD Tahun 2023 Audited)*

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	NILAI
1	Belanja Operasional	2.068.339.045.331	1.890.948.953.345	91,42	1
2	Belanja Modal	246.156.815.069	217.207.125.026	88,24	1
3	Belanja Tidak Terduga	1.850.000.000	427.605.701	23,11	0
4	Belanja Transfer	430.783.014.600	430.716.395.360	99,98	1
Jumlah Nilai					3

Sumber : LRA Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Jenis Belanja yang realisasinya di atas 80% ada 3 jenis belanja dari 4 Jenis Belanja. Sehingga dapat dihitung hasil pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran sebagai berikut :

$$\text{Nilai Penyerapan Anggaran} = \frac{3}{4} \times 20 = 15$$

$$\text{Persentase Capaian Indeks Penyerapan Anggaran} = \frac{15}{20} \times 100\% = 75\%$$

Catatan : angka 20 adalah Nilai yang ditetapkan untuk komponen penyerapan anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Realisasi Belanja Tidak Terduga kurang optimal disebabkan semakin jarangya bencana yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2022. Selain itu korban bencana yang dilaporkan oleh masyarakat melalui perangkat desa/kelurahan setempat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mengalami penurunan.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran serta solusi yang telah dilakukan adalah :

Permasalahan :

Realisasi Anggaran bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetapi merupakan tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana Teknis Anggaran. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak mempunyai wewenang secara teknis untuk mempercepat atau meningkatkan pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Kendala :

Masih banyak perangkat daerah yang belum menyusun rencana strategis terkait pemetaan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga seringkali pelaksanaan kegiatan menumpuk pada akhir Tahun Anggaran. Perencanaan pelaksanaan anggaran yang kurang matang dapat menyebabkan adanya program kegiatan yang gagal terlaksana atau tertunda pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggar yang tidak optimal.

Solusi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan TAPD dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya terkait laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bupati Pematang Jaya pada Kegiatan Rapat Koordinasi Dinas. Penyelenggaraan rapat tersebut diharapkan dapat mendorong upaya Perangkat Daerah untuk lebih mempercepat pelaksanaan kegiatan terutama yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

7. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah;

Indikator sasaran ini terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu :

1. Kemandirian Keuangan

Kemandirian Keuangan merupakan suatu kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Formula Kemandirian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Solvabilitas Operasional

Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan Pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

Formula Solvabilitas Operasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah :

$$\frac{\text{Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO}}{\text{Total Beban LO}}$$

3. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang.

Formula Solvabilitas Jangka Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah :

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$

4. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas Keuangan adalah suatu kondisi Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi

peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*)

Formula Fleksibilitas Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah :

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

5. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Formula Solvabilitas Jangka Pendek berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah :

$$\frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

6. Solvabilitas Pelayanan

Solvabilitas Pelayanan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Formula Solvabilitas Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah :

$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD) oleh Tim Penilai IPKD Provinsi yang dilaksanakan pada Tahun 2024, hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah berdasarkan data Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 hasilnya sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan mendapat nilai 0,3197
2. Solvabilitas Operasional mendapat nilai 0,2494

3. Solvabilitas Jangka Panjang mendapat nilai 0,5342
4. Fleksibilitas Keuangan mendapat nilai 0,4668
5. Solvabilitas Jangka Pendek mendapat nilai 0,0209
6. Solvabilitas Pelayanan mendapat nilai 0,0195

Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah secara keseluruhan adalah 4,0260 dari target nilai 15. Sehingga persentase ketercapaian Indikator Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah adalah :

$$4,0260/15 \times 100\% = 26,84\%$$

Catatan : 15 adalah Nilai untuk Komponen IPKD Dimensi 5 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020

Target Indikator sasaran Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah sebesar 15. Sedangkan realisasi pada pengukuran IPKD yang dilaksanakan Tahun 2024 untuk indikator ini sebesar 4,0260 atau 26,84%.

Permasalahan :

Indeks Kondisi Keuangan Daerah dipengaruhi oleh banyak komponen, antar lain : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kewajiban, DAK, Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap dan Jumlah Penduduk. Alokasi anggaran atas komponen yang mempengaruhi Kondisi Keuangan Daerah tersebut diluar kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Alokasi anggaran merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kendala :

Dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga perubahan nominal alokasi anggaran baik pendapatan maupun belanja antara KUA PPAS dan APBD, di luar kendali Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Solusi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu berupaya melakukan koordinasi dan menginformasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah, dalam rangka memprioritaskan pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah serta mengakomodir usulan-usulan masyarakat terkait kepentingan umum.

8. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki;

Indikator sasaran ini bertujuan mendorong Pemerintah Daerah agar peduli dengan aset daerah yang dimiliki khususnya aset daerah yang berupa tanah. Pencatatan aset daerah berupa tanah pada KIB Perangkat Daerah, seringkali tidak dibarengi dengan dokumentasi bukti kepemilikan aset daerah. Sehingga data aset daerah yang dicatat di KIB sebagai aset daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan data aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah karena sebagian belum memiliki bukti kepemilikan. Indikator sasaran ini bertujuan meminimalkan kemungkinan aset daerah berupa tanah milik Pemda yang hilang karena kelalaian dalam memproses bukti kepemilikan. Indikator sasaran ini sejalan dengan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi yang selalu melakukan Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK kepada Pemerintah Daerah, terkait upaya Pemda dalam melakukan sertifikasi tanah.

Formula Indikator Sasaran Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Aset Daerah yang dimiliki}}{\text{Jumlah Aset Daerah yang dikuasai}} \times 100\%$$

Jumlah aset daerah khususnya aset berupa tanah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau aset daerah berupa tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 911 Bidang. Sedangkan jumlah keseluruhan aset daerah berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebanyak 2.001 Bidang. Dari data tersebut maka dapat dihitung Indikator Sasaran persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml aset daerah berupa tanah yg telah bersertifikat (911)}}{\text{Jml aset daerah berupa tanah yg belum bersertifikat (2.001)}} \times 100\% = 45,53\%$$

Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki belum memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 65%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi untuk mencapai target Indikator Sasaran Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki serta solusi yang telah dilakukan adalah :

Permasalahan :

Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 perihal Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) untuk sertifikasi tanah aset instansi pemerintah dan pemerintah daerah, belum secara signifikan meringankan beban APBD dalam proses fasilitasi pembuatan sertifikat tanah milik Pemda. Karena dalam proses pembuatan sertifikat masih dibutuhkan biaya pengukuran, biaya pembuatan patok, biaya pemasangan patok dan biaya lain terkait proses pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan jumlah aset tanah milik Pemda yang belum bersertifikat sangat banyak. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pensertifikatan tanah milik Pemda walaupun Biaya sertifikat tanah milik Pemda Rp.0,- sesuai Surat Kementerian Agraria Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020.

Kendala :

Hasil Monitoring Fisik di lapangan bahwa terdapat aset tanah yang tercatat milik Pemda tetapi dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain/masyarakat tanpa ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam upaya pembuatan sertifikat tanah, selain kemampuan anggaran Pemerintah Daerah dalam mencukupi biaya yang diperlukan untuk pensertifikatan tanah milik Pemda yang jumlahnya tidak sedikit.

Solusi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya pendekatan kepada pihak yang menguasai aset daerah berupa tanah tanpa perjanjian terlebih dahulu serta berupaya memperoleh bukti-bukti bahwa aset tanah tersebut telah dicatat sebagai aset Pemda. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencukupi kebutuhan anggaran pensertifikatan tanah Pemda agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	6	9	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,0394	62,5009	80	65,7108	82,14	80	70,1277	87,66
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	94,34	97,83	93	99,13	106,59	99,15	99,13	99,98
1.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	8,175	3	15	12,6237	84,16	15	6,5277	43,52
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20	15	20	15	75,00	20	15	75
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	1,1433	2,5182	15	2,2200	14,80	15	4,0260	26,84
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	34,8	32,98	60	36,96	61,60	65	45,53	70,05
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79,78	81,67	84,08	82,67	98,32	84,09	86,63	103,02
		Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	61,92	62,15	60,50	63,25	104,55	64,00	64,15	100,23

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Realisasi Indikator ini sebesar 70,1277 dari target sebesar 80 sehingga capaiannya 87,66%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditentukan karena terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu :

- a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan dokumen penganggaran (KUA PPAS dan APBD);
- b. Konsistensi pengalokasian anggaran dalam mematuhi mandatory spending dan standar pelayanan minimal (SPM);
- c. Kemudahan akses data keuangan daerah oleh masyarakat melalui website Pemda Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Transparansi dan publikasi yang tepat waktu atas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada website Pemda Kabupaten Pematang Jaya;
- e. Optimalisasi belanja daerah termasuk penyaluran Belanja Tidak Terduga;
- f. Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- g. Konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Indikator Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Realisasi indikator ini 99,13% dari target 99,15% sehingga capaiannya 99,98%. Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pemanfaatan BMD adalah :

- a. Melakukan evaluasi perjanjian sewa BMD yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi jangka waktu sewa maupun dari sisi tarif sewanya;
- b. Melakukan cek lokasi dan penilaian ulang atas BMD yang akan disewakan;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur sewa BMD yang sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat selaku penyewa.

d. Menetapkan tarif sewa BMD dengan Keputusan Bupati dalam rangka memperkecil terjadinya fraud dalam pemanfaatan BMD dengan sistim sewa.

3. Indikator Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran.

Realisasi indikator ini sebesar 6,5277 dari target sebesar 15 sehingga capaiannya sebesar 43,52%. Capaian tersebut kurang optimal disebabkan oleh :

- a. Masih terdapat beberapa nomenklatur program pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang tidak sesuai dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. Masih terdapat nomenklatur program dan nominal program yang tidak sesuai antara RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan KUA PPAS Tahun 2023.
- c. Masih terdapat nomenklatur program dan nominal program yang tidak sesuai antara KUA PPAS Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023.

4. Indikator Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran

Realisasi Indikator ini sebesar 15 dari target sebesar 20 atau capaiannya sebesar 75%. Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja yang kurang dari 80%. Pada tahun 2023, dari 4 jenis belanja pada APBD yang realisasi anggarannya kurang dari 80% adalah Belanja Tidak Terduga. Realisasi belanja tidak terduga pada tahun penilaian (Tahun 2023) sebesar 23,11% hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan realisasi indikator Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran kurang optimal.

5. Indikator Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Realisasi Indikator ini sebesar 4,0260 dari target sebesar 15 sehingga capaiannya sebesar 26,84%. Capaian yang sangat rendah ini disebabkan karena belum optimalnya kemandirian keuangan, solvabilitas layanan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas operasional.

6. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki

Realisasi Indikator ini sebesar 45,53 dari target sebesar 65 sehingga capaiannya sebesar 70,05%. Indikator ini menghitung seberapa banyak tanah milik Pemda yang telah bersertifikat dibanding dengan tanah yang dikuasai oleh Pemda. Hal-hal yang menyebabkan realisasi indikator ini kurang optimal adalah :

- a. Masih banyaknya tanah yang dikuasai pemda beririsan dengan tanah milik masyarakat atau lembaga lain;
- b. Masih adanya tanah yang dikuasai Pemda tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk memproses sertifikat tanah;
- c. Masih terdapat berkas-berkas pengajuan sertifikat tanah yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, yang belum diproses karena masih perlu klarifikasi dan pengukuran ulang.

7. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indikator ini sebesar 86,63 dari target sebesar 84,09 sehingga capaiannya sebesar 103,02. Hal-hal yang telah dilakukan atas capaian ini adalah :

- a. Telah dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan;
- b. Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala khususnya terkait pemberian pelayanan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Telah dilakukan revisi SOP dalam rangka menyederhanakan rantai pelayanan agar pelaksanaan pelayanan lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.
- d. Telah dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat.

8. Indikator Nilai SAKIP BPKAD

Realisasi indikator ini sebesar 64,15 dari target sebesar 64 sehingga capaiannya sebesar 100,23%. Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai SAKIP yang optimal adalah :

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala yang melibatkan pimpinan BPKAD;
- b. Meningkatkan keselarasan dokumen perjanjian kinerja dengan laporan kinerja dan dokumen perencanaan dan penganggaran;

- c. Mengoptimalkan publikasi dokumen kinerja ke website BPKAD;
- d. Mengupayakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja tepat waktu;
- e. Melakukan penyesuaian dokumen cascading kinerja dan rencana aksi setiap tahun anggaran berganti;
- f. Menyusun Pohon kinerja.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis BPKAD Kabupaten Pematang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Sasaran	Tahun 2024		Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6/7x 100%)
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80	70,1277	80	87,66
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	99,15	99,13	93	106,59
1.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15	6,5277	15	43,52
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20	15	20	75
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15	4,0260	15	26,84
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	65	45,53	70	65,04
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09	86,63	84,10	103,00
		Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	64,00	64,15	60,80	105,50

Sumber : Laporan Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Pematang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dijelaskan tingkat kemajuan masing-masing capaian indikator dibanding dengan target akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 70,1277 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 80 sehingga capaiannya sebesar 87,66%. Masih terdapat 12,34% untuk mencapai 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :

- a) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran agar antara nomenklatur program dan nominal program yang tercantum pada dokumen tersebut konsisten;
- b) Meningkatkan kepatuhan pengalokasian anggaran terhadap mandatory spending yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c) Meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu publikasi dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- d) Mengoptimalkan realisasi anggaran pada setiap jenis belanja APBD;
- e) Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f) Meningkatkan akuntabilitas data pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 99,13% sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 93% sehingga capaiannya sebesar 106,59%. Capaian indikator ini telah melebihi 100%. Beberapa hal yang telah dilakukan agar indikator ini tercapai optimal adalah :

- a. Melakukan evaluasi perjanjian sewa BMD yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi jangka waktu sewa maupun dari sisi tarif sewanya;
- b. Melakukan cek lokasi dan penilaian ulang atas BMD yang akan disewakan;

- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur sewa BMD yang sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat selaku penyewa.
 - d. Menetapkan tarif sewa BMD dengan Keputusan Bupati dalam rangka memperkecil terjadinya fraud dalam pemanfaatan BMD dengan sistim sewa.
3. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran
- Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 6,5277 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 15 sehingga capaiannya sebesar 43,52%. Masih terdapat 56,48% untuk mencapai 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :
- a. Menjaga konsistensi kebijakan alokasi anggaran mulai dari tahap penyusunan KUA PPAS sampai dengan APBD;
 - b. Meningkatkan sinergi dan hubungan baik antara TAPD dengan DPRD, agar penyusunan APBD selaras dengan KUA PPAS;
 - c. Penyusunan KUA PPAS selalu mempedomani RKPD;
 - d. Kebijakan pemerintah daerah telah diakomodir pada dokumen perencanaan secara rigit sehingga tidak kebijakan yang bersifat mendadak yang diakomodir program pada dokumen APBD tanpa perencanaan sebelumnya.
4. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran
- Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 15 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 20 sehingga capaiannya sebesar 75%. Masih terdapat 25% untuk mencapai 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :
- a. Meningkatkan kualitas alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - b. Melakukan evaluasi atas penyaluran Belanja Tidak Terduga agar ke depan belanja tidak terduga dapat terserap optimal atau lebih dari 80%;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala atas realisasi belanja khususnya realisasi belanja tidak terduga, agar dapat dilakukan penggeseran sebelum akhir tahun anggaran berakhir.

5. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 4,0260 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 15 sehingga capaiannya sebesar 26,84%. Masih terdapat kekurangan capaian yang sangat signifikan atau sebesar 73,16%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercapai Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- b. Menurunkan belanja pegawai;
- c. Meningkatkan penyediaan aset tetap berupa infrastruktur yang dapat digunakan untuk pelayanan pelayanan publik;
- d. Melakukan efisiensi belanja.

6. Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 46,53% sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 70% sehingga capaiannya sebesar 65,04%. Masih terdapat 34,96% untuk mencapai 100%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai realisasi yang optimal adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah;
- b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan barang milik daerah khususnya terkait dengan proses pengajuan sertifikat tanah;
- c. Meningkatkan sinergi dan koordinasi yang intens dengan Badan Pertanahan Nasional terkait upaya sertifikasi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Melakukan pemetaan permasalahan dalam melaksanakan proses pembuatan sertifikat tanah;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta masyarakat terkait batas batas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 86,63 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 84,10 sehingga capaiannya sebesar 103,00%. Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan karena capaiannya telah melebihi 100%. Hal-hal yang telah dilakukan untuk mencapai IKM yang optimal adalah :

- a. Telah dilakukan upaya penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan;
- b. Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala khususnya terkait pemberian pelayanan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Telah dilakukan revisi SOP dalam rangka menyederhanakan rantai pelayanan agar pelaksanaan pelayanan lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.
- d. Telah dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat.

8. Nilai SAKIP BPKAD

Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 64,15 sedangkan target pada akhir renstra BPKAD Tahun 2021-2026 sebesar 60,80 sehingga capaiannya sebesar 105,54%. Nilai SAKIP BPKAD pada tahun 2024 telah melebihi target pada akhir renstra, sehingga perlu penyesuaian target. Penyesuaian target dilakukan pada perubahan perjanjian kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Hal-hal yang telah dilakukan dalam mencapai realisasi nilai SAKIP yang optimal adalah :

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala yang melibatkan pimpinan BPKAD;
- b. Meningkatkan keselarasan dokumen perjanjian kinerja dengan laporan kinerja dan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Mengoptimalkan publikasi dokumen kinerja ke website BPKAD;
- d. Mengupayakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja tepat waktu;
- e. Melakukan penyesuaian dokumen cascading kinerja dan rencana aksi setiap tahun anggaran berganti;
- f. Menyusun Pohon kinerja.

3.1.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori kapasitas fiskal yang sama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang dengan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dalam kelompok klaster Kapasitas Fiskal rendah/sangat rendah yang dilaksanakan pada Tahun 2024

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	IPKD	Nilai
1	Grobogan	12,282	19,8276	14,4828	20	5,4381	15	87,0301	A
2	Kudus	13,974	20	15	15	6,5522	15	85,5263	A
3	Purworejo	14,271	20	14,4828	15	5,0854	15	83,8395	A
4	Semarang	8,888	20	13,9655	20	5,9027	15	83,7562	A
5	Blora	13,069	20	15	15	5,0487	15	83,1172	A
6	Demak	12,64	20	13,9655	15	5,9205	15	82,5258	A
7	Tegal	12,693	20	14,4828	15	4,9117	15	82,0875	A
8	Wonosobo	12,399	14,6552	14,4828	20	4,5246	15	81,0614	B
9	Magelang	10,893	20	15	15	4,7409	15	80,6337	B
10	Boyolali	9,373	20	10,0862	20	5,8074	15	80,2666	B
11	Batang	10,845	20	14,7414	15	4,5263	15	80,1129	B
12	Klaten	9,610	20	14,7414	15	4,6348	15	78,9865	B
13	Karanganyar	5,430	19,8276	11,6379	20	6,5655	15	78,4614	B
14	Wonogiri	12,517	15	15	15	4,1242	15	76,6408	B
15	Jepara	10,654	15	14,4828	15	6,1096	15	76,2460	B
16	Banjarnegara	7,213	20	13,9655	15	4,8577	15	76,0363	B
17	Pati	10,769	15	13,9655	15	6,0964	15	75,8311	B
18	Banyumas	11,616	15	15	15	3,7305	15	75,3467	B
19	Sragen	14,455	15	10,8621	15	4,5896	15	74,9064	B
20	Cilacap	11,169	15	12,1552	15	5,7848	15	74,1090	B
21	Temanggung	10,675	15	14,7414	15	3,2468	15	73,6632	B
22	Pekalongan	9,484	14,8276	14,4828	15	4,4841	15	73,2789	B
23	Kebumen	12,587	15	15	10	4,6657	15	72,2530	B
24	Pemalang	6,528	19,8276	14,7414	15	4,0260	10	70,1277	B
25	Purbalingga	9,370	15	5,9483	15	4,4029	15	63,7212	C
RATA-RATA NASIONAL								73,1894	
STANDAR DEVIASI NASIONAL								8,4480	

Sumber : SK Gubernur Nomor : 900/39/TAHUN 2024

Berdasarkan data yang tercantum pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/39 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel 3.11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPKD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menempati peringkat ke 24 dari 25 Kabupaten di Jawa Tengah yang klaster kapasitas fiskal daerahnya rendah/sangat rendah. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah pencapaian hasil opini BPK RI atas laporan keuangan daerah. Hasil opini BPK RI atas LKPD menjadi komponen Dimensi 6 IPKD. Pada Dimensi 6, hanya Kabupaten Pemalang yang tidak memenuhi target nilai maksimal atau hanya mendapatkan nilai 10 dari target 15. Sedangkan Kabupaten lainnya mendapatkan nilai maksimal yaitu 15. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pemalang pernah mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2022. Opini WDP tersebut berdampak pada hasil pengukuran Dimensi 6 selama 3 tahun, karena Dimensi 6 IPKD menilai hasil opini BPK atas LKPD untuk 3 tahun berturut-turut.

Menimbang pada saat entri data ke aplikasi IPKD serta penyediaan dokumen pendukungnya melibatkan banyak perangkat daerah maka hasil akhir pengukuran IPKD bukan semata karena peran BPKAD. BPKAD berperan sebagai bagian dari Tim penyusun IPKD Kabupaten Pemalang, yang menyediakan kebutuhan data dan dokumen pendukung terkait. Sehingga hasil akhir pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang merupakan hasil kerja Tim Penyusun IPKD. Perlu kerja sama yang baik, sinergi, koordinasi yang intens serta pemahaman yang memadai dari personil Perangkat Daerah yang terlibat dalam entrian IPKD, agar Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Pemalang dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Selain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Nilai SAKIP BPKAD bila disandingkan dengan Nilai SAKIP perangkat daerah lain di Kabupaten Pemalang, menempati peringkat ke 21 dari 41 perangkat daerah di Kabupaten Pemalang. Jadi dapat dijelaskan bahwa walaupun nilai SAKIP BPKAD naik setiap tahunnya tetapi secara peringkat se-Kabupaten Pemalang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa perangkat daerah nilai SAKIPnya melonjak jauh dibanding nilai SAKIP pada tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan nilai SAKIP BPKAD cenderung stabil setiap tahunnya. Secara rinci

hasil penilaian SAKIP perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	NILAI	PERINGKAT
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,20	1
Sekretariat Daerah	67,22	2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	66,93	3
Dinas Komunikasi dan Informatika	66,25	4
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	66,22	5
Dinas Pertanian	66,20	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,00	7
Dinas Perhubungan	65,66	8
Badan Kepegawaian Daerah	65,66	9
Dinas Tenaga Kerja	65,60	10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65,55	11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65,46	12
Inspektorat	65,43	13
Dinsos KBPP	65,36	14
Dinas Perikanan	65,09	15
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,05	16
Kecamatan Pemalang	65,02	17
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64,69	18
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	64,57	19
Dinas Lingkungan Hidup	64,44	20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64,15	21
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	63,89	22
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63,84	23
Satuan Polisi Pamong Praja	63,82	24
Kecamatan Watukumpul	63,76	25
Dinas Kesehatan	63,61	26
Diskoperindag	63,48	27
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	63,06	28
Kecamatan Bodeh	61,41	29
Kecamatan Petarukan	60,98	30
Kecamatan Pulosari	60,82	31
Sekretariat DPRD	60,62	32
Kecamatan Bantarbolang	60,40	33

PERANGKAT DAERAH	NILAI	PERINGKAT
Kecamatan Taman	60,25	34
Kecamatan Comal	60,22	35
Kecamatan Moga	60,14	36
Kecamatan Randudongkal	60,08	37
Kecamatan Warungpring	60,04	38
Kecamatan Ulujami	60,04	39
Kecamatan Ampelgading	60,04	40
Kecamatan Belik	57,13	41

Sumber : Hasil Rekap LHE Inspektorat atas SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Indikator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang lainnya yang dapat dibandingkan dengan capaian perangkat daerah lain adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2024, semua unit pelayanan dan perangkat daerah telah melakukan survey kepuasan Masyarakat sebagai sumber data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar 86,63. Apabila dibandingkan dengan rata-rata IKM semua unit layanan tahun 2024 yang sebesar 85,09 maka IKM BPKAD termasuk tinggi atau melebihi rata-rata IKM semua unit layanan di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2024. Tetapi IKM tersebut masih perlu ditingkatkan lagi mengingat BPKAD hanya berada pada nomor urut 25 dari 101 unit layanan, dan tertinggal jauh dengan SMP N 6 Pemalang yang berada pada urutan pertama dengan IKM 90,97. Rekap data IKM semua unit layanan di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan
Se-Kabupaten Pemalang Tahun 2024

NAMA UNIT PELAYANAN	IKM	URUTAN BERDASARKAN BESARAN IKM
SMP N 6 Pemalang	90,97	1
Kec Randudongkal	90,91	2
PDAM Tirta Mulia	90,84	3
Disdukcatpil	90,02	4
Puskesmas Kalimas	89,83	5
Bagian Organisasi	89,64	6
Puskesmas Kebondalem	89,46	7

NAMA UNIT PELAYANAN	IKM	URUTAN BERDASARKAN BESARAN IKM
Dinas PMPTSP	89,30	8
Puskesmas Pulosari	89,13	9
Dinas Kesehatan	88,98	10
Kec Ulujami	88,54	11
Kec Ampelgading	88,11	12
Kel Sugihwaras	88,00	13
SMP N 4 Pemalang	87,89	14
Kel Wanarejan Selatan	87,69	15
Kec Moga	87,65	16
Disperik	87,63	17
Kel Mulyoharjo	87,62	18
Puskesmas Losari	87,60	19
BPBD	87,21	20
RSUD M Ashari	87,20	21
Bakesbangpol	87,13	22
Kel Paduraksa	87,09	23
Dispertan	86,94	24
BPKAD	86,63	25
Bagian Umum	86,54	26
Kec Warungpring	86,41	27
Dinsos KBPPA	86,17	28
Kec Watukumpul	85,76	29
Kec Pemalang	85,67	30
Kel Pelutan	85,55	31
Disnaker	85,54	32
Bagian Perencanaan	85,41	33
Kec Belik	85,38	34
Kec Taman	85,10	35
Puskesmas Rowosari	85,09	36
Dinpusarda	85,08	37
Puskesmas Karangasem	85,01	38
Kel Purwoharjo	84,94	39
Dindikbud	84,87	40
Bappeda	84,78	41
Puskesmas Banjardawa	84,72	42
Puskesmas Cikadu	84,66	43
Kec Petarukan	84,56	44
Kel Beji	84,40	45
BKD	84,18	46
PT BPR Bank Pemalang	84,14	47

NAMA UNIT PELAYANAN	IKM	URUTAN BERDASARKAN BESARAN IKM
SMP N 1 Watukumpul	83,72	48
Bagian PBJ	83,66	49
Puskesmas Warungpring	83,56	50
Puskesmas Jebed	83,46	51
Sekretariat DPRD	83,37	52
Kel Bojongbata	83,21	53
Bagian Hukum	83,17	54
Puskesmas Mojo	83,09	55
Puskesmas Banyumudal	83,08	56
Kel Kebondalem	83,00	57
Satpol PP	82,96	58
Kec Pulosari	82,87	59
Kec Bantarbolang	82,81	60
Puskesmas Purwoharjo	82,72	61
Bapenda	82,53	62
Kec Comal	82,51	63
SMP N 1 Moga	82,29	64
DPU TR	82,24	65
SMP N 4 Randudongkal	82,22	66
Puskesmas Watukumpul	82,15	67
PT BPR BKK Taman	82,06	68
Disperkim	81,98	69
Kel Widuri	81,96	70
Puskesmas Mulyoharjo	81,96	71
Puskesmas Petarukan	81,83	72
Puskesmas Kebandaran	81,82	73
Puskesmas Bantarbolang	81,77	74
Kec Bodeh	81,73	75
Kel Petarukan	81,72	76
Puskesmas Belik	81,70	77
Inspektorat	81,53	78
Puskesmas Sarwodadi	81,38	79
SMP N 2 Ampelgading	81,33	80
PT LKM BKD	81,21	81
Disparpora	81,10	82
Bagain Pemerintahan	80,72	83
Puskesmas Paduraksa	80,71	84
Dinpermasdes	80,70	85
Diskoperindag	80,56	86
PT Aneka Usaha	80,44	87

NAMA UNIT PELAYANAN	IKM	URUTAN BERDASARKAN BESARAN IKM
Puskesmas Kabunan	80,43	88
DLH	80,42	89
Puskesmas Randudongkal	80,39	90
SMP N 2 Randudongkal	80,35	91
Dishub	80,15	92
Puskesmas Klareyan	80,07	93
Puskesmas Jatiroyom	79,94	94
Diskominfo	78,55	95
SMP N 5 Ulujami	77,47	96
SMP N 4 Taman	0,00	97
SMP N 2 Ulujami	0,00	98
SMP N 1 Pemalang	0,00	99
SMP N 5 Taman	0,00	100
SMP N 3 Ulujami	0,00	101
RATA-RATA IKM		85,09

Sumber : Rekap hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada perangkat daerah di Kabupaten Pemalang Tahun 2024

3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80	70,3277	87,66	Pada Tahun 2024, realisasi indikator hasil pengukuran IPKD tidak mencapai target. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan pada awal penyusunan dokumen rencana strategis BPKAD Tahun 2021-2026 belum mempunyai basic data. Karena Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dipublikasikan pada awal 2021 dan Pengukuran IPKD pertama kali dilakukan pada triwulan 3 Tahun 2021 untuk tahun penilaian 2018,2019 dan 2020. Sedangkan hasil pengukuran IPKD pertama kali dipublikasikan pada tanggal 28 Desember 2021 atau setelah dokumen perencanaan ditetapkan. Sehingga target yang ditetapkan atas indikator Hasil Pengukuran IPKD hanya berdasarkan perkiraan saja, bukan berdasarkan base data yang valid.	BPKAD berupaya menyesuaikan target Hasil Pengukuran IPKD pada penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi tahun tahun sebelumnya, agar tidak terjadi gap yang tinggi antara target dan realisasi.
		Persentase Pemanfaatan BMD	%	99,15	99,13	100	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 93%. Sehingga pada Tahun 2024, target tersebut perlu disesuaikan, agar lebih besar dari target pada tahun 2023. Persentase pemanfaatan BMD selalu mencapai target yg ditetapkan karena hampir semua potensi BMD yang dapat dimanfaatkan, sebagian besar telah dibewakan.	Pada penyusunan renstra tahun 2025-2029, target persentase pemanfaatan barang milik daerah disesuaikan, agar tidak terjadi interval yang jauh dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
1.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15	6,5277	43,52	Dari Realisasi indikator sasaran Hasil Pengukuran Kesesuaian Dokumen Penganggaran tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kesesuaian nomenklatur program dan nominal program antara dokumen KUA PPAS dan APBD Tahun 2023 belum optimal. Hal ini sering terjadi karena adanya perubahan kebijakan pengalokasian anggaran yang dipicu oleh perubahan fokus Pembangunan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah.	Dalam rangka meminimalisir ketidaksesuaian nomenklatur program dan nominal program antara dokumen KUA PPAS dan APBD maka perlu dilakukan pemahaman terhadap pengambil kebijakan dan pihak legislative terkait pentingnya kebijakan yang konsisten. Terlebih kebijakan tersebut terkait erat dengan pengalokasian anggaran.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20	15	75	Realisasi indikator hasil pengukuran indeks penyerapan anggaran belum mencapai target. Indikator ini mengukur Tingkat penyerapan anggaran per jenis belanja pada APBD dengan batas minimal realisasi penyerapan 80%. Dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran belanja tidak terduga tidak mencapai 80%, termasuk realisasi belanja tidak terduga tahun 2024. Hal ini disebabkan penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat didasarkan pada basic data karena realisasi belanja tidak terduga sangat dipengaruhi dengan kejadian-kejadian tidak terduga yang terjadi pada tahun berjalan seperti bencana alam, bencana non alam, keperluan mendesak akibat kondisi ekonomi ataupun sosial seperti inflasi, covid, kemiskinan dan lain-lain.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah perlu lebih cermat memantau kebutuhan belanja tidak terduga agar dapat dialokasikan anggaran belanja tidak terduga yang lebih riil. Sehingga persentase realisasi belanja tidak terduga mencapai batas minimal yang ditentukan pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran IPKD, yaitu sebesar 80%.
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15	4,0260	26,84	Pengukuran kondisi keuangan dihitung berdasarkan data keuangan yang tercantum pada Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi indikator hasil pengukuran indeks kondisi keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Pemalang masih perlu ditingkatkan, kemampuan aset tetap yang dimiliki oleh Pemkab Pemalang untuk mendukung pelayanan belum optimal serta fleksibilitas keuangannya belum mencukupi.	Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu konsisten dalam penyusunan postur APBD dimana pemerintah lebih fokus mencukupi mandatory spending seperti menurunkan belanja pegawai, meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik, memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan standar pelayanan minimal, kebutuhan pelayanan dasar dan mandatory spending lainnya sesuai ketentuan. Selain itu dalam rangka mencapai kemandirian keuangan kabupaten pemalang, perlu ditingkatkan proporsi PAD pada APBD, agar ketergantungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap Dana Perimbangan dapat diturunkan.
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	65	45,53	70,05	Realisasi indikator persentase barang milik daerah yang dimiliki dipengaruhi oleh data jumlah tanah milik pemerintah kabupaten pemalang yang telah bersertifikat. Realisasi pada tahun 2024 menggambarkan bahwa masih banyak tanah milik pemerintah kabupaten pemalang yang belum bersertifikat. Dari potensi tanah yang dikuasai pemerintah kabupaten	BPKAD berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah milik Pemkab pemalang dengan selalu berkoordinasi terkait pemenuhan persyaratan pensertifikatan yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Indikator Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	Solusi yang dilakukan
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,09	85,63	100	Realisasi IKM pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh BPKAD telah memenuhi kebutuhan pengguna layanan.	Berdasarkan realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat maka perlu meningkatkan target IKM pada dokumen renstra tahun 2025-2029.
		Nilai SAKIP	Nilai	64,00	64,15	100	Realisasi nilai SAKIP BPKAD dari tahun 2021 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan sehingga perlu menyesuaikan target nilai SAKIP pada perjanjian kinerja tahun 2024.	BPKAD berupaya meningkatkan nilai SAKIP dengan menjaga keselarasan data antara dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta menyusun pohon kinerja, cascading, rencana aksi dan tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi capaian kinerja.

Sumber : Laporan Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

3.1.7. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Realisasi Anggaran dan realisasi kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dalam rangka menghitung efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 3.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran serta efisiensi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
I	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah				454.344.118.887	452.733.239.623	99,65	Kurang Efisien
	<i>Indikator Tujuan :</i>							
	• Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	80	70,1277	87,66				
	• Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	99,15	99,13	99,98				
1.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				445.176.144.000	444.206.628.625	97,36	Tidak Efisien
	<i>Indikator Sasaran :</i>							
	• Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	6,5277	43,52	1.310.000.000	1.245.364.119	95,07	Tidak Efisien
	• Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	15,00	75,00	442.184.144.000	441.331.534.409	99,81	Tidak Efisien
	• Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	4,0260	26,84	795.000.000	791.346.750	99,49	Tidak Efisien
	• Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	65	45,53	70,05	887.000.000	838.383.347	94,52	Tidak Efisien
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				9.167.974.887	8.526.610.998	93,00	Efisien
	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,09	86,63	103,02				
	• Nilai SAKIP BPKAD	64	64,15	100,23				

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran, sehingga berdasarkan Tabel 3.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, realisasi anggarannya 99,65%. Tujuan tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Hasil Pengukuran IPKD dengan capaian 87,66% dan Persentase pemanfaatan BMD dengan capaian 99,98%. Sehingga rata-rata capaian kinerjanya adalah 93,82%. Total anggaran BPKAD sebesar Rp.454.344.118.887,00, sedangkan SILPA BPKAD setelah dikurangi dengan indikator tujuan yang tidak mencapai 100% adalah Rp.641.363.889,00. Sehingga apabila dibandingkan maka efisiensi anggarannya sebesar 0,141% atau kurang efisien. Capaian kinerja yang menyebabkan kurang efisien adalah kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, dimana serapan anggaran kegiatan tersebut sangat tinggi dan output kinerja berupa dokumen KUA PPAS dan APBD juga telah disusun tetapi kurang memperhatikan kesesuaian nominal program antara kedua dokumen tersebut, sehingga berpengaruh pada hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah kabupaten pemalang. Kegiatan lain yang kurang efisien terdapat pada kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Serapan anggaran kegiatan tersebut termasuk kategori sangat tinggi karena didukung dengan serapan anggaran dari sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota dan sub kegiatan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, tetapi terdapat sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yang mengakomodir Belanja Tidak Terduga dengan serapan anggaran rendah yaitu 64,18%. Serapan Belanja Tidak Terduga mempengaruhi capaian IPKD secara keseluruhan karena dengan rendahnya realisasi belanja tidak terduga maka hasil pengukuran Dimensi 4 pada IPKD tidak maksimal.
- Pada sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggarannya sebesar 97,16%. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) indikator yaitu Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian

Dokumen penganggaran dengan capaian kinerja 43,52%, Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan capaian kinerja 75%, Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan capaian 26,84% dan Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki dengan capaian sebesar 70,05%. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 53,853%. Indikator sasaran ini tidak ada yang mencapai 100%. Sehingga total SILPA Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditambah SILPA Program Pengelolaan Barang Milik Daerah setelah dikurangi dengan SILPA yang tidak mencapai 100% adalah 0 (Nol). Efisiensi sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 0% (Tidak Efisien). Yang menyebabkan tidak efisien adalah :

- Serapan anggaran atas Indikator Hasil pengukuran indeks kesesuaian dokumen penganggaran sebesar 95,07% tetapi tidak sejalan dengan capaian kerjanya yang hanya sebesar 43,52% sehingga tidak efisien.
 - Serapan anggaran atas Indikator Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran sebesar 99,81% tetapi tidak sejalan dengan capaian kerjanya yang hanya sebesar 75% sehingga tidak efisien.
 - Serapan anggaran atas Indikator Hasil Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah sebesar 99,49% tetapi tidak sejalan dengan capaian kerjanya yang hanya sebesar 26,84% sehingga tidak efisien.
 - Serapan anggaran atas indikator persentase barang milik daerah yang dimiliki sebesar 94,52% sedangkan capaian kerjanya hanya 70,05% atau tidak efisien.
- Selanjutnya pada sasaran kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, realisasi anggarannya sebesar 93%. Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 103,02% dan Nilai SAKIP BPKAD dengan capaian kinerja sebesar 100,23%, Sehingga rata-rata capaian kerjanya sebesar 101,625%. Sasaran ini sangat efisien karena dengan serapan anggaran yang tinggi menghasilkan capaian output atas 2 indikator pendukungnya lebih dari 100% semua.

Berikut cara penghitungan rata-rata capaian kinerja untuk masing-masing tujuan/sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah , rata-rata capaian kinerjanya sebagai berikut :
$\frac{(87,66\% + 99,98\%)}{2} = 93,82\%$
Sasaran 1 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah , rata-rata capaian kinerjanya sebagai berikut :
$\frac{(43,52\% + 75\% + 26,84\% + 70,05\%)}{4} = 53,853\%$
Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik , rata-rata capaian kinerjanya sebagai berikut :
$\frac{(103,02\% + 100,23\%)}{2} = 101,625\%$

Selanjutnya perhitungan Efisiensi anggaran per tujuan/sasaran dihitung sebagai berikut :

NO	SASARAN	PERHITUNGAN EFISIENSI ANGGARAN
I	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah	(Total SILPA BPKAD - SILPA Indikator tujuan yang capaiannya kurang dari 100%) dibagi Total Anggaran BPKAD X 100% $\frac{Rp.1.610.879.264,00 - Rp.969.515.375,00}{Rp.454.344.118.887,00} \times 100\%$ $\frac{Rp.641.363.889,00}{Rp.454.344.118.887,00} \times 100\% = 0,141\% \text{ (Kurang Efisien)}$
1.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(SILPA Program Pengelolaan Keuangan Daerah + SILPA Program Pengelolaan Barang Milik Daerah) - SILPA Indikator sasaran yang tidak mencapai 100% dibagi (Anggaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah + Anggaran Program Pengelolaan BMD X 100% $\frac{(Rp.920.898.722,00+Rp.48.616.653,00)-(Rp.920.898.722,00+Rp.48.616.553,00)}{(Rp.444.289.144.000,00 + Rp.887.000.000,00)} \times 100\%$ $\frac{Rp.0,00}{Rp.445.176.144.000,00} \times 100\% = 0\% \text{ (Tidak Efisien)}$
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	(SILPA Program Penunjang - SILPA sasaran yang tidak mencapai 100%) dibagi Total Anggaran Program Penunjang X 100% $\frac{Rp.641.363.889,00 - Rp.0,00}{Rp.9.167.974.887,00} \times 100\% = 6,996\% \text{ (Efisien)}$

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah - Hasil Pengukuran IPKD - Persentase Pemanfaatan BMD	2	87,66% 99,98%	99,65%	93,82%	0,141% (Kurang Efisien)
1.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran - Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran - Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah - Persentase Barang Milik daerah yang dimiliki	4	43,52% 75% 26,84% 70,05%	97,16%	53,853%	0% (Tidak Efisien)
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai SAKIP BPKAD	2	103,02% 100,23%	93,00%	101,625%	6,996% (Efisien)

**1.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini :

;

;

;

Tabel 3.14
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	87,66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian	100	Tidak Menunjang	
					Persentase capaian perencanaan dan evaluasi kinerja	100	Tidak Menunjang	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	100	Menunjang	
					Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	72,02	Menunjang	
					Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100	Menunjang	
					Persentase penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	Menunjang	
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang				
Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	99,98	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang			
1.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	43,52	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100	Menunjang	
					Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbedaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	100	Menunjang
		Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	75,00	Kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		Persentase tersalurkannya belanja transfer dan belanja tidak tertuga	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	26,84	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100	Menunjang	
				Kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Peningkatan Sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	100	Menunjang	
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	70,05	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen pengelolaan barang milik daerah	100	Menunjang	
1.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	100	Menunjang	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	100	Menunjang	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang	
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	100	Menunjang	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	100	Menunjang	
		Nilai SAKIP BPKAD	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada perangkat daerah	100	Menunjang	
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang	

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 dapat dijelaskan bahwa dalam pencapaian indikator tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah, Program Penunjang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menunjang ketercapaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkaitan dengan operasional perangkat daerah, tidak melaksanakan kegiatan teknis yang menunjang pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta kegiatan dan sub kegiatan yang berada di bawahnya, hanya menunjang Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan saja.

Sedangkan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta kegiatan dan sub kegiatan yang berada di bawahnya merupakan penunjang ketercapaian tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah dan Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.167.974.887	8.526.610.998	93,00%			
01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.250.000	17.139.000	99,36%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	100%	2 Dok	2 Dok	100%
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	500.000	500.000	90%	49 Dok	49 Dok	100%
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.250.000	2.250.000	97,78%	98 Dok	98 Dok	100%
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.250.000	2.250.000	100%	49 Dok	49 Dok	100%
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	7.750.000	7.739.000	99,86%	98 Dok	98 Dok	100%
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000	2.250.000	100%	5 Lap	5 Lap	100%
01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.292.646.000	5.719.079.415	90,89%	5 Dok	5 Dok	100%
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.396.000	5.678.036.415	90,84%	37 org	37 org	100%
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.500.000	40.293.000	97,09%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000	100%	1 Lap	1 Lap	100%
01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	107.405.000	97,64%	1 Jenis	1 Jenis	100%
01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	110.000.000	107.405.000	97,64%	52 Org	52 Org	100%
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.698.462	677.151.456	98,32%	7 Jenis	7 Jenis	100%
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.002.000	49.996.300	99,99%	1 paket	1 paket	100%
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.022.958	48.434.950	96,83%	1 Paket	1 Paket	100%
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.615.954	31.970.000	89,76%	1 Paket	1 Paket	100%
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.628.750	121.687.369	96,86%	12 Lap	12 Lap	100%
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.428.800	410.214.837	99,46%	12 Lap	12 Lap	100%
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	11.848.000	98,73%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	946.916.625	921.460.250	97,31%	3 Jenis	3 Jenis	100%
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	577.204.000	566.970.500	98,23%	2 Unit	2 Unit	100%
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.000.000	21.992.750	99,97%	6 Unit	6 Unit	100%
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	347.712.625	332.497.000	95,62%	19 Unit	19 Unit	100%
01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	778.544.800	752.094.581	96,60%	4 Jenis	4 Jenis	100%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.500.000	21.300.000	94,67%	12 Lap	12 Lap	100%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.750.000	444.981.423	98,72%	12 Lap	12 Lap	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.360.000	3.962.000	90,87%	12 Lap	12 Lap	100%
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.934.800	281.851.158	93,66%	12 Lap	12 Lap	100%
01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.919.000	332.281.296	99,51%	<i>4 Jenis</i>	<i>4 Jenis</i>	<i>100%</i>
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.850.000	185.705.573	99,39%	20 Unit	20 Unit	100%
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	44.910.548	99,80%	43 Unit	43 Unit	100%
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.069.000	84.862.175	99,76%	2 Unit	2 Unit	100%
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000	16.803.000	98,84%	1 Unit	1 Unit	100%
02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	444.289.144.000	443.368.245.278	99,79%			
02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.310.000.000	1.245.364.119	95,07%	<i>11 Dok</i>	<i>11 Dok</i>	<i>100%</i>
02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	310.000.000	294.585.425	95,03%	2 Dok	2 Dok	100%
02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	173.000.000	164.632.500	95,16%	2 Dok	2 Dok	100%
02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	389.970.000	386.401.096	99,08%	2 Dok	2 Dok	100%
02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	437.030.000	399.745.098	91,47%	5 Dok	5 Dok	100%
02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	750.000.000	732.287.950	97,64%	<i>6 Dok</i>	<i>6 Dok</i>	<i>100%</i>
02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	330.000.000	327.737.500	99,31%	24 Dok	24 Dok	100%
02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	165.000.000	158.622.900	6,14%	12 Lap	12 Lap	100%
02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	92.000.000	87.068.350	94,64%	1 Dok	1 Dok	100%
02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	163.000.000	158.859.200	97,46%	82 org	82 org	100%
02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	595.000.000	592.597.673	99,60%	<i>7 Jenis</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>100%</i>
02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15.000.000	14.883.500	99,22%	18 Lap	18 Lap	100%
02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Penda	215.000.000	213.554.744	99,33%	1 Lap	1 Lap	100%
02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	303.531.000	303.199.679	99,89%	2 Dok	2 Dok	100%
02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	31.469.000	30.992.750	98,49%	1 Dok	1 Dok	100%
02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penda	30.000.000	29.967.000	99,89%	1 Dok	1 Dok	100%
02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	441.434.144.000	440.599.246.459	99,81%	<i>90%</i>	<i>90%</i>	<i>100%</i>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Daerah						
02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	424.780.464.000	424.652.064.000	99,97%	12 Lap	12 Lap	100%
02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.972.500.000	1.266.002.459	64,18%	12 Lap	12 Lap	100%
02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.681.180.000	14.681.180.000	100%	12 Lap	12 Lap	100%
02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000	198.749.077	99,37%	1 Jenis	1 Jenis	100%
02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	100.000.000	99.200.077	99,20%	1 Dok	1 Dok	100%
02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.549.000	99,55%	82 Org	82 Org	100 %
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	887.000.000	838.383.347	94,52%			
3.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	887.000.000	838.383.347	94,52%	6 Jenis	6 Jenis	100%
3.2.01.0007	Pengamanan BMD	500.000.000	454.499.916	90,90%	4 Lap	4 Lap	100%
3.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	340.000.000	337.780.231	99,35%	4 Dok	4 Dok	100%
3.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.000.000	46.103.200	98,09%	1 Lap	1 Lap	100%
	Jumlah	454.344.118.887	452.733.239.623	99,65%			100%

Pada Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola 3 Program yang terdiri dari 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Keseluruhan target output kinerja kegiatan dan subkegiatan telah tercapai atau 100%. Khusus kegiatan pengamanan barang milik daerah, outputnya 4 Laporan yang terdiri dari :

1. Laporan Pengadaan dan Pemasangan Patok Tanah Milik Pemda;

Pada Tahun 2024, pengadaan patok tanah milik Pemda dilaksanakan oleh CV Dimas Beji sebanyak 700 unit. Pemasangan patok dilaksanakan bertahap.

Tahap pertama, pemasangan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024 sebanyak 265 patok dengan rincian Lokasi pemasangan sebagai berikut :

- Komplek imigrasi dan sawah blok salam beji sebanyak 9 patok;
- Sawah lawangrejo sebanyak 9 patok;
- PIR Bojongbata sebanyak 5 patok;
- Sawah Wanamulya sebanyak 10 patok;
- Kebon Tebu Wanamulya sebanyak 10 patok;
- TPU Murah Bojongbata sebanyak 4 patok;
- Sawah jatisari Wanamulya sebanyak 12 patok;
- Sawah Kosambi Banjarmulya sebanyak 2 patok;
- Komplek kantor kepala desa wanarejan utara sebanyak 29 patok;
- Paduraksa sebanyak 18 patok;
- Makam kebondalem sebanyak 36 patok;
- Comal sebanyak 16 patok;
- Cibelok sebanyak 12 patok;
- Pegongsoran sebanyak 12 patok;
- Tambahan Comal sebanyak 1 patok;
- Tambahan Blok Salam beji sebanyak 2 patok;
- Widodaren sebanyak 17 patok;
- Nyalembeng sebanyak 10 patok;
- Moga sebanyak 4 patok;
- Petarukan sebanyak 21 patok;
- Museum Pelutan sebanyak 4 patok;
- Pelutan sebanyak 8 patok;

- Pegirangan sebanyak 7 patok.

Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 12, 13 dan 29 November 2024 sebanyak 32 patok dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Limbangan Kecamatan Ulujami sebanyak 18 patok;
- Desa Asemtoyong Kecamatan Taman sebanyak 8 patok;
- Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebanyak 4 patok;
- Desa Siremeng Kecamatan Pulosari sebanyak 2 patok.

Berdasarkan pelaksanaan pemasangan patok tersebut maka masih terdapat sisa patok yang belum terpasang sebanyak 403 (700-265-32). Sisa patok ini merupakan saldo awal persediaan patok yang pemasangannya akan dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Laporan Pengadaan dan Pemasangan Papan Identitas Barang Milik Daerah; Pengadaan papan identitas barang milik daerah pada tahun 2024 dilaksanakan oleh CV Dimas Beji secara bertahap. Tahap pertama bersumber pada anggaran penetapan APBD 2024, telah dilaksanakan pengadaan papan pada tanggal 10 Juli 2024 sebanyak 50 unit. Pemasangan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 14 Agustus 2024 dengan rincian Lokasi pemasangan papan identitas barang milik daerah sebagai berikut :

- Desa Pedagung sebanyak 15 unit;
- Pagaran sebanyak 3 unit;
- Museum Pemalang sebanyak 2 unit;
- Gunung Tiga Belik sebanyak 3 unit;
- Belakang SMP 1 Pemalang sebanyak 3 unit;
- Sebelah barat rusunawa sebanyak 1 unit;
- Sebelah barat museum pemalang sebanyak 1 unit;
- Watukumpul sebanyak 4 unit;
- Utara Terminal Lama sebanyak 5 unit;
- Utara Terminal sebanyak 5 unit;
- Timur Terminal lama sebanyak 3 unit;
- Selatan terminal lama sebanyak 2 unit;
- Sugihwaras sebanyak 1 unit;
- Selatan museum sebanyak 1 unit.

Pengadaan papan identitas barang milik daerah tahap kedua berdasarkan perubahan APBD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 sebanyak 20 unit. Pemasangan papan identitas tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 20 November 2024 dengan rincian Lokasi pemasangan papan identitas barang milik daerah sebagai berikut :

- Kelurahan Paduraksa sebanyak 5 unit;
- TPI Tanjungsari Kel Sugihwaras sebanyak 2 unit;
- Tambak Asemdayong sebanyak 1 unit;
- Tambak Limbangan sebanyak 2 unit;
- TPI Mojo sebanyak 2 unit;
- Pasar Buah sebanyak 1 unit;
- Pasar Beras sebanyak 2 unit;
- Pasar Buah dan Sayur sebanyak 2 unit;
- Lapangan Dewa Ruci Sugihwaras sebanyak 3 unit.

Papan identitas barang milik daerah yang pengadaannya dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 70 unit, telah dipasang semua pada Lokasi sebagaimana tersebut di atas. Sehingga tidak ada saldo persediaan papan identitas barang milik daerah pada tahun 2024.

3. Laporan Pelaksanaan Asuransi Barang Milik Daerah;

Asuransi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah asuransi alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang masih dalam kondisi baik. Pekerjaan asuransi dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwokerto dan PT Jasaraharja Putera Wilayah Pekalongan. Asuransi Kendaraan dinas dan alat berat dilaksanakan bertahap.

Tahap 1 dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2024, untuk mengasuransikan Kendaraan Dinas Jabatan dengan total nilai sebesar Rp.22.994.916,00. Rincian kendaraan dinas yang diasuransikan sebagai berikut :

- Toyota innova nopol G 1 D Tahun 2022;
- Toyota innova nopol G 1085 D tahun 2021;
- Mitsubishi Triton nopol G 8129 XD tahun 2021.

Tahap 2 dilaksanakan oleh PT Bumi Putera Muda Purwokerto pada tanggal 24 Juni 2024 untuk mengasuransikan alat berat dengan nilai kontrak

sebesar Rp.28.490.000,00. Adapun alat berat yang diasuransikan sebanyak 4 unit yang terdiri dari :

- Excavator Komatsu PC 160 Tahun 2014
- Excavator Komatsu PC 160 Tahun 2015
- Bulldozer Komatsu PC 160 Tahun 2015
- Excavator Komatsu PC 200 Tahun 2023

Tahap 3 dilaksanakan oleh PT Jasaraharja Putera Wilayah Pekalongan pada tanggal 13 Juni 2024 untuk mengasuransikan 10 (sepuluh) kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat daerah yang masih dalam kondisi baik. Kendaraan Dinas operasional yang diasuransikan sebagai berikut :

- Toyota Innova Venturer Nopol G 6 D Tahun 2019
- Honda CRV RMI ZWD Nopol G 1007 XD Tahun 2016
- Toyota Innova Venturer Nopol G 10 D Tahun 2021
- Toyota Innova Venturer Nopol G 1084 XD Tahun 2021
- Toyota Innova Reborn Nopol G 42 D Tahun 2017
- Toyota Fortuner Nopol G 9 D Tahun 2020
- Toyota Fortuner Nopol G 12 D Tahun 2020
- Toyota New Camry Nopol G 3 D Tahun 2016
- Toyota Innova Reborn Nopol G 24 D Tahun 2016
- Toyota Innova Reborn Nopol G 35 D Tahun 2017

4. Laporan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda.

Pada awal Maret 2021, Badan Pengejolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Bidang Akuntansi dan Aset Daerah telah mencatat bahwa jumlah keseluruhan Tanah Milik Pemda sebanyak 2.286 bidang tanah. Setelah dilakukan pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka terdapat koreksi atas catatan jumlah tanah milik pemda tersebut. Ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adanya aset yang belum dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 49 bidang tanah di Kelurahan. Tanah yang belum dicatat tersebut menambah jumlah aset tanah milik Pemda secara keseluruhan menjadi 2.335 bidang. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdapat Kapitalisasi Tanah Milik Pemda sebanyak 25 Bidang dan koreksi pencatatan kepemilikan tanah Pemda sebanyak 135 Bidang. Tanah yang

dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut merupakan tanah milik desa yang digunakan untuk SD dan Puskesmas. Hal ini mengurangi jumlah tanah milik Pemda yang telah dicatat sebesar 169 Bidang (25 + 135). Sehingga total tanah milik Pemkab pada akhir tahun 2021 yang sebenarnya adalah 2.335 – 160 atau sebanyak 2.175 Bidang.

Jumlah sertifikat yang telah selesai diproses dan dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada awal Tahun 2021 sebanyak 807 Sertifikat. Karena adanya koreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pengakuan aset yang dimiliki oleh SMA yang merupakan kewenangan Provinsi dan telah dicatat oleh provinsi Jawa Tengah sebagai aset milik Provinsi. Karena pencatatan aset daerah yang over Lapping tersebut maka jumlah sertifikat yang telah dicatat Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dikurangi sebanyak 53 bidang. Sehingga jumlah sertifikat yang sebenarnya adalah 754 Sertifikat, yang dihitung dari jumlah sertifikat yang dicatat pada awal tahun 2021 sebanyak 807 sertifikat dikurangi sertifikat yang dobel catat sebanyak 53 sertifikat. Berdasarkan riwayat pencatatan tersebut maka persentase tanah milik Pemda yang telah bersertifikat secara keseluruhan pada Tahun 2021 adalah :

$$754/2.175 \times 100\% = 34,67\%.$$

Pada Tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan monitoring aset daerah dan menemukan data aset daerah yang belum dicatat pada KIB berupa Jembatan dan Jalan, Irigasi dan Prasarana Sarana Umum (PSU). Rincian aset daerah yang belum dicatat pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah Jembatan dan Jalan sebanyak 154 bidang
2. Jumlah Irigasi sebanyak 99 bidang
3. Jumlah Prasarana Sarana Umum sebanyak 110 bidang, yang terdiri dari Fasilitas Umum sebanyak 55 bidang dan Fasilitas Sosial sebanyak 55 bidang.

Total penambahan aset berupa tanah milik pemda yang belum dicatat sebanyak $(154+99+110) = 363$ bidang, sehingga jumlah keseluruhan tanah milik Pemda adalah $(2.175 + 363) = 2.538$ bidang.

Jumlah sertifikat yang selesai diproses pada Tahun 2023 sebanyak 101 sertifikat, pada Tahun 2022 sebanyak 83 sertifikat, sedangkan jumlah sertifikat yang selesai pada Tahun 2021 sebanyak 754 sertifikat. Sehingga Total sertifikat yang selesai sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak $(754 + 83+101) = 938$ sertifikat.

Dari penjelasan tersebut dapat dihitung persentase tanah milik Pemda yang telah bersertifikat pada Tahun 2023 yaitu :

$$\frac{938 \text{ bidang}}{2.538 \text{ bidang}} \times 100\% = 36,96\%$$

Pada akhir Tahun 2024, Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan bahwa telah terjadi overlapping (dobel catat) atas tanah milik Pemkab Pemalang yang telah bersertifikat. Dari jumlah sertifikat tanah sebanyak 938 bidang, overlapping sebanyak 33 bidang. Sehingga jumlah sertifikat tanah milik Pemda yang sebenarnya pada awal tahun 2024 adalah 905 bidang $(938-33)$. Sampai dengan akhir tahun 2024, progress sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang yang telah diselesaikan sebanyak 6 bidang. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah yang digunakan untuk prasarana sarana umum (PSU). Sehingga total tanah milik Pemkab Pemalang yang telah bersertifikat sampai dengan akhir 2024 adalah $(905+6) = 911$ sertifikat.

Kepala bidang akuntansi dan aset daerah juga menyampaikan bahwa terdapat koreksi penambahan dan pengurangan atas potensi tanah milik Pemkab Pemalang.

Koreksi penambahan berupa adanya tanah baru sebanyak 1 bidang dan 154 bidang tanah berupa tanah eks bengkok yang belum dicatat sebagai potensi. Selain itu terdapat penambahan potensi lagi yaitu tanah milik pemkab di wilayah kelurahan widuri sebanyak 48 bidang, tanah di desa Pedagung (dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup) sebanyak 1 bidang dan tanah yang rencana akan digunakan untuk Pelabuhan/dermaga pengumpan (dilaporkan oleh Dinas Perhubungan) sebanyak 2 bidang.

Sedangkan koreksi pengurangan berupa aset lainnya sebanyak 246 bidang, pengurangan sebanyak 8 bidang, tanah milik puskesmas desa sebanyak 45 bidang dan tanah yang ditempati SD di desa sebanyak 87 bidang. Selain pengurangan tersebut, Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah menyampaikan bahwa penambahan PSU sebanyak 363 pada Tahun 2022 belum dapat diakui sebagai potensi tanah milik Pemkab Pemalang karena data PSU berupa jalan, jembatan, irigasi, fasum dan fasos sebanyak 363 bidang tersebut masih berupa ruasan tanpa nilai nominal. Perangkat Daerah terkait belum dapat menentukan nilai nominal atas data yang dikirimkan sehingga belum bisa dimasukkan sebagai potensi tanah milik Pemkab Pemalang.

Dari koreksi penambahan dan pengurangan tersebut maka data potensi aset tanah milik Pemda yang sebenarnya adalah (2.538+1+154+48+1+2-363-246-8-45-87)= 1995 Bidang.

Pada Tahun 2024, sertifikat yang telah diselesaikan sebanyak 6 bidang berupa sertifikat PSU. Data potensi PSU tersebut belum tercatat sebagai tanah milik Pemkab Pemalang, sehingga 6 sertifikat PSU yang telah jadi pada tahun 2024 menambah jumlah potensi tanah milik Pemkab Pemalang. Sehingga data jumlah sertifikat pada Tahun 2024 sebanyak (905 + 6) = 911 sertifikat sedangkan jumlah potensi tanah yang dimiliki Pemkab Pemalang sebanyak (1995 + 6) = 2001 bidang. Berdasarkan data akhir tahun 2024 tersebut dapat dihitung persentase sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang sebagai berikut :

$$\frac{911 \text{ bidang}}{2.001 \text{ bidang}} \times 100\% = 45,53\%$$

Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 65%.

Sedangkan rumusan dalam menghitung persentase total ketercapaian Indikator kinerja sub kegiatan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah persentase realisasi kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100\%$$

Sehingga persentase realisasi kinerja sub kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{(100\% \times 49 \text{ sub kegiatan})}{49 \text{ sub kegiatan}} \times 100\% \right\} = 100\%$$

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Capaian Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu dengan nilai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Pemalang tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja BPKAD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BPKAD tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPKAD Kabupaten Pemalang memiliki 8 sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai (capaian kinerja melebihi 100%) dan 6 sasaran strategis tidak tercapai (capaian kinerja kurang dari 100%)
2. Sasaran Strategis yang tercapai adalah :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian 103,02%
 - b. Nilai SAKIP BPKAD dengan persentase capaian 100,23%
3. Sasaran Strategis yang tidak tercapai adalah :
 - a. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan persentase capaian 87,66%
 - b. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan persentase capaian 99,98%
 - c. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran dengan persentase capaian 43,52%
 - d. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan persentase capaian 75%

- e. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan persentase capaian 26,84%
 - f. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki dengan persentase capaian 70,05%
4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BPKAD adalah Konsistensi Kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBD, belum sepenuhnya mandatory spending teralokasikan sesuai ketentuan dalam penganggaran Pemerintah Daerah, Database barang milik daerah belum akuntabel, belum mencukupinya kompetensi personil pengolah data aset daerah dan belum terintegrasinya sistem keuangan daerah dengan sistem barang milik daerah.

Rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara TAPD dengan perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu ditingkatkan;
2. Perlunya peningkatan kerja sama dengan pihak legislatif terkait penyusunan postur APBD sesuai ketentuan dalam rangka pemenuhan mandatory spending dan pemenuhan standar pelayanan minimal;
3. Peningkatan koordinasi dengan Bappeda terkait peningkatan kualitas perencanaan agar selaras dengan penganggaran;
4. Peningkatan peran Bappeda selaku koordinator Tim penyusun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
5. Peningkatan Kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pematang Jaya terkait pemenuhan persyaratan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat penting. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah, monitoring pelaksanaan perjanjian kinerja, evaluasi ketidak tercapaian indikator yang telah ditetapkan serta arah dan kebijakan pimpinan untuk mendapatkan solusi pada setiap masalah dan kendala yang timbul menjadi komponen Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tidak dapat diabaikan dalam meraih nilai SAKIP yang baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKAD kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 10 Februari 2025


KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG

NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720129 199803 1 010

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Pematang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKAD kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pematang.

Pematang, 10 Februari 2025

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMATANG



NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720129 199803 1 010